

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS SOSIAL PADA PANTI
ASUHAN Di KOTA PEKANBARU”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**HESTI SHINTYA HANDINI
NPM: 147110108**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Tuhan yang maha Esa dan Solawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru ”**.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu untuk membantu hingga skripsi ini bisa selesai.

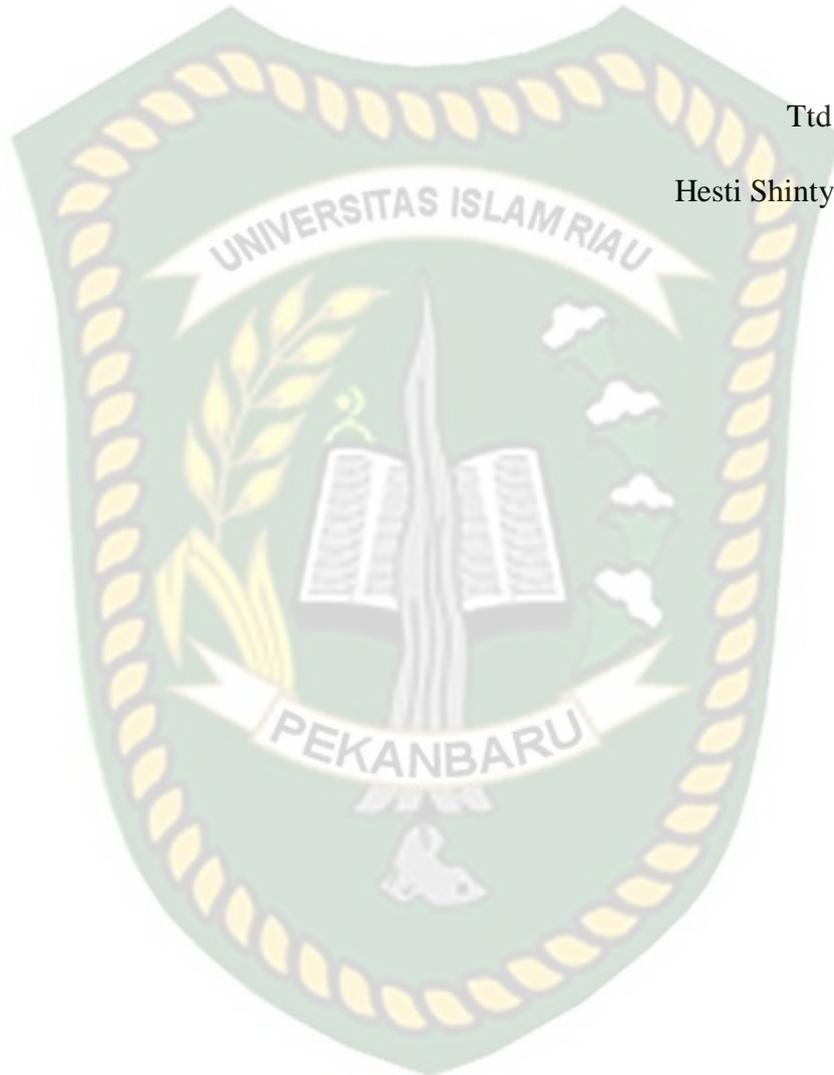
4. Ibu Eka Komala Sari S.Sos, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Bapak Drs. Syapril Abdullah M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
6. Selanjutnya kepada seluruh Staff pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
8. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Zulkifli, Ibunda Siti Aisyah dan Adinda May Fariza Zahra, Deny Prasetyo S.AP beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
9. Dan untuk teman-teman Administrasi Publik kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Administasi Publik angkatan 2014 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 20 November 2019

Ttd

Hesti Shintya Handini



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Administasi	20
2. Konsep Organisasi	25
3. Konsep Manajemen.....	29
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	31
5. Konsep Pengawasan	33
B. Kerangka Pikir	37
C. Konsep Operasional	38
D. Operasional Variabel.....	40
E. Teknik Pengukuran	41
BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Sejarah dan Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	50
B. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	52
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	53
D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ...	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Identitas Responden	71
1. Jenis Kelamin Responden	71
2. Pendidikan Responden.....	72
3. Umur Responden.....	74
B. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	76
1. Menetapkan Standar.....	76
2. Melakukan Penilaian Pada Proses Pengawasan.....	84
3. Mengoreksi Pengambilan Tindakan.....	91
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	108
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN	113
LAMPIRAN.....	115

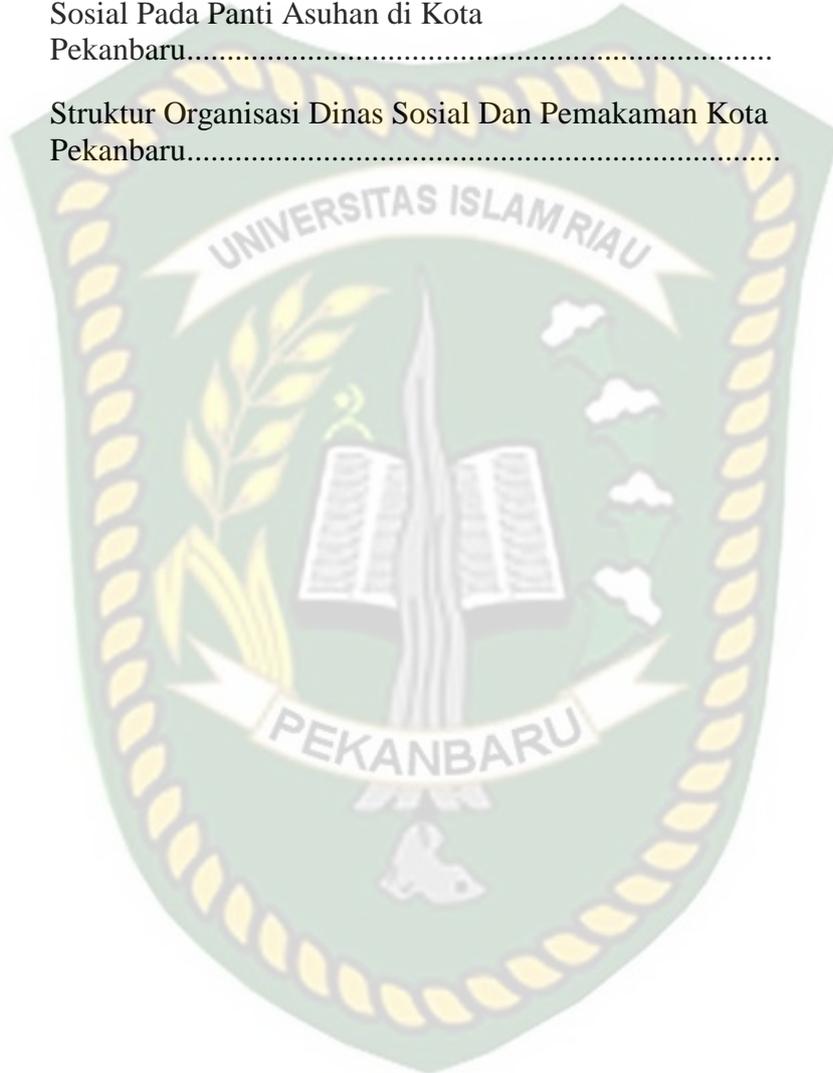
DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	6
I.2	Data Penghuni Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	10
I.3	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terhadap ORSOS/Yayasan/LKS.....	14
I.4	Penetapan Anggota Tim Monitoring LKS Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	16
I.5	Jadwal Dinas Sosial Melakukan Pengawasan Ke Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	17
II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru	40
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru.....	45
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru.....	49
V.1	Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin (pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru).....	71
V.2	Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin (pengelola panti asuhan di kota pekanbaru).....	72
V.3	Klasifikasi responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir (pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru).....	73

V.4	Klasifikasi responden berdasarkan jejang pendidikan terakhir (pengelola panti asuhan di kota pekanbaru).....	73
V.5	Klasifikasi responden berdasarkan latar belakang umur (pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru).....	75
V.6	Klasifikasi responden berdasarkan latar belakang umur (pengelola panti asuhan di kota pekanbaru).....	75
V.7	Tanggapan responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru tentang penetapan standar.....	77
V.8	Tanggapan responden pengelola panti asuhan di kota pekanbaru tentang penetapan standar.....	80
V.9	Tanggapan responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru tentang melakukan penilaian di dalam proses pengawasan.....	85
V.10	Tanggapan responden pengelola panti asuhan di kota pekanbaru tentang melakukan penilaian di dalam proses pengawasan.....	89
V.11	Tanggapan responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dinas sosial kota pekanbaru tentang mengoreksi pengambilan tindakan.....	94
V.12	Tanggapan responden pengelola panti asuhan di kota pekanbaru tentang mengoreksi pengambilan tindakan.....	99
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden pegawai dinas terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	104
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden pengelola panti asuhan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru.....	37
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	37
2. Data Telly Responden Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	37
3. Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.....	37
4. Dokumentasi Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor/UIR-Fs/Kpts/20 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR.....	37
5. Dokumentasi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor.../DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/0000 Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	37
6. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	37

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Shintya Handini
NPM : 147110108
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 20 November 2019

Hesti Shintya Handini

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS SOSIAL PADA PANTI ASUHAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Hesti Shintya Handini

Kata Kunci : Pengawasan, Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian, Mengoreksi Pengambilan Tindakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru, dimana Pengawasan diukur dengan 3 indikator yaitu : Menetapkan Standar, Melakukan Penilaian dan Mengoreksi Pengambilan Tindakan. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru Provinsi Riau ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menilai kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat 2 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai 12 orang dan pengelola panti asuhan 27 orang. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah teknik sampling jenuh. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data Primer, dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara. Serta data Sekunder yang dikumpulkan melalui teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa tingkat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru berada pada interval cukup terlaksana.

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF SOCIAL SERVICES IN
PROSPEROUS HEALTH IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Hesti Shintya Handini

*Keywords: Supervision, Setting Standards, Conducting Assessments,
Correcting Action Taking*

This study aims to determine the level of Social Service Supervision Implementation at the Orphanage in Pekanbaru City, where Supervision is measured by 3 indicators, namely: Setting Standards, Assessing and Correcting Action Taking. This type of research located in the Social Service of Pekanbaru City in Riau Province is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material to assess the empirical conditions of the objectivity of the research objectives. There are 2 population groups and the sample in this study is 12 employees and 27 orphanages. The sampling technique used in data collection is a saturated sampling technique. The types and data collection techniques used consisted of Primary data, collected by questionnaire and interview techniques. As well as Secondary data collected through observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the level of Implementation of the Social Service Supervision at the Orphanage in the City of Pekanbaru was at a sufficiently complete interval.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	30
1. Tujuan Penelitian.....	30
2. Manfaat Penelitian.....	30
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	31
1. Konsep Administrasi.....	31
2. Konsep Organisasi.....	34
3. Konsep Manajemen.....	37
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	38
5. Konsep Pengawasan.....	42
5.1 Efektivitas Pengawasan.....	46
5.2 Efisiensi Pengawasan.....	48
6. Konsep Tenaga Kerja.....	49
6.1 Teori Ketenagakerjaan.....	51
7. Permen ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016.....	52
B. Kerangka Pikir.....	60
C. Hipotesis.....	61
D. Konsep Operasional.....	62
E. Operasional Variabel.....	65
F. Teknik Pengukuran.....	67
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Populasi dan Sampel.....	70
D. Teknik Penarikan Sampel.....	71
E. Jenis dan Sumber Data.....	72

F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
G. Teknik Analisis Data.....	74
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	74
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	76

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	77
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	77
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	81
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	84
B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	86
1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	89
2. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.....	89
3. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru....	91

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	92
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	94
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	95
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	98
1. Pembinaan.....	97
2. Pemeriksaan	107
3. Pengujian	116
4. Penyidikan Tinda Pidana Ketenagakerjaan.....	124
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	132
D. Faktor Penghambat yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekanbaru Dengan Judul Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	136
.....	

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Rencana Jadwal Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Perusahaan di Kota Pekanbaru Tahun 2017	19
I.2	: Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2017	22
I.3	: Data Upah Perusahaan Di Bawah Upah Minimum Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017	25
II.1	: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	66
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	71
III.2	: Tabel Populasi dan Sampel Pegawai di Masing-masing Perusahaan yang Diteliti	71
III.3	: Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	75
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013.	82
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Di Kota Pekanbaru Tahun 2013	83
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	85
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	93
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Tenaga Kerja Perusahaan	93
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	94

V.4	:	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Tenaga Kerja Perusahaan	95
V.5	:	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	96
V.6	:	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja Perusahaan	96
V.7a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pembinaan	98
V.7b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pembinaan	100
V.8a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pembinaan	102
V.8b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pembinaan	104
V.9a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pemeriksaan	107
V.9b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pemeriksaan	109
V.10a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pemeriksaan	112
V.10b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pemeriksaan	113
V.11a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pengujian	117
V.11b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Pengujian	118
V.12a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pengujian	121
V.12b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Pengujian	122
V.13a	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	125
V.13b	:	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pada Indikator Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	126

V.14a	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	129
V.14b	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tenaga Kerja Perusahaan Pada Indikator Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	130
V.15	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai terkait dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	133
V.16	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terkait dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	134

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
I	: Kuisisioner Untuk Pegawai dengan judul Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	144
2	: Kuisisioner Untuk Tenaga Kerja Perusahaan dengan judul Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	150
3	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Pegawai)	156
4	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Humas Perusahaan)	159
5	: Rekap Telly Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Pegawai)	162
6	: Rekap Telly Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Tenaga Kerja Perusahaan)	165
7	: Dokumentasi Penelitian Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).	169
8	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).	174
9	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).	175
10	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang Pelaksanaan	176

Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten.

- 11 : Surat Keterangan Balasan dari Dinas Tenaga Kerja terkait Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). 177



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	61
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	91



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Trecker (didalam Hakim 2011;19), Administrasi adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Winardi (2009;43) juga mengemukakan Organisasi adalah sebuah wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang senantiasa terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bekerjasama sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama.

Menurut Siagian (2011;5) Manajemen dapat didefinisikan dalam dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan sosial terhadap orang-orang kurang mampu. Kemiskinan adalah suatu persoalan yang hingga saat ini masih belum tuntas penanganannya di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu agenda penting yang dibicarakan orang diseluruh dunia,

karena kemiskinan merupakan musuh yang harus diperangi dengan segala daya upaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial mempunyai fungsi pengawasan terhadap panti Sosial seperti panti asuhan. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pelimpahan kewenangan bagi setiap Pemerintah Daerah menjadi suatu kepercayaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri, baik dalam merumuskan visi dan diberbagai instansi ataupun menerapkan standar prosedur kerja yang ada di instansi-instansi atau dinas-dinas tersebut.

Selain itu sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah, memajukan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu melaksanakan tugas serta peran sesuai tuntutan yang telah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Upaya meningkatkan sumber daya manusia menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi setiap bidang aktifitas manusia.

Pelaksanaan tugas-tugas,Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.pekerja sosial adalah Pegawai Negri Sipil(PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Unit pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi lainnya.

Pada tahun 1974 jawatan sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I,untuk tingkat pusat dan tingkat Provinsi disebut kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat kabupate/kota disebut dengan Departemen Social kabupaten/kota.

Pada tahun 1998 Departemen Social RI,dibubarkan oleh presiden yaitu K.H, Abdurahman Wahid atau Gusdur,pada saat itu tingkat pusat Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Social dan Kesehatan RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar diprovinsi Riau dimana Pekanbaru juga merupakan Ibu Kota provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.056.916 jiwa.Kota Pekanbaru memiliki luas lebih kurang 446,50 Km² yang terdiri dari 12 kecamatan. Kota Pekanbaru merupakan kota berstatus Metropolitan

dan juga menjadi pusat perekonomian di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk yang tiap tahun terus bertambah.

Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah perkotaan khususnya di daerah Pekanbaru. salah satu diantaranya adalah masalah anak terlantar dan dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan terkait yang harus di atasi oleh Dinas Sosial Pekanbaru.

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/ kedua orang tua wali/pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Banyak kita ketahui lumayan banyak permasalahan sosial di Kota Pekanbaru seperti banyaknya anak-anak yang mengemis, mengamen, berjualan di persimpangan-persimpangan jalan yaitu di lampu-lampu merah Kota Pekanbaru. Dan kejadian beberapa waktu yang lalu tentang kematian seorang balita di salah satu panti asuhan di Kota Pekanbaru. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian khusus oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan ini.

Bahkan di Kota Pekanbaru saat ini tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur sangat merajalela. Fenomena ini sangat miris. Untuk itu sangat dibutuhkan bimbingan-bimbingan dari keluarga, masyarakat, panti-panti asuhan dan juga pemerintah Kota Pekanbaru maupun provinsi riau untuk melindungi generasi-generasi bangsa yang seperti ini. Seharusnya anak-

anak terlantar ini di lindungi oleh negara dengan cara dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial terkait dengan memasukkan di panti-panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan hak pendidikan seperti anak-anak lainnya. Tetapi bukan sebatas itu saja, Dinas Sosial juga harus melakukan pengawasan terhadap panti-panti asuhan yang ada supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi terhadap anak-anak tersebut.

Panti asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan social kepada anak, sehingga memperoleh kesempatan yang luas guna untuk pengembangan kepribadiannya (Depsos RI, 2004:4).

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan kesejahteraan social anak.
2. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan social anak.
3. Pusat pengembangan keterampilan(fungsi penunjang).

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional yaitu seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan dipanti asuhan dan selayaknya panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak-anak yang meliputi hak terhadap perlindungan; hak terhadap tumbuh kembang anak; hak terhadap partisipasi ; serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup.

Selain itu panti asuhan anak juga harus memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional seperti setiap anak ,menerima vaksin, imunisasi, vitamin, obat cacung dan berbagai kebutuhan kesehatan sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada beberapa panti asuhan yang berada di Kota Pekanbaru antara lain :

Tabel 1.1 : Data Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Nama Panti Asuhan	Masa Aktif Panti Asuhan	Alamat	Pendiri/Ketua Panti Asuhan
1	PA. Amanah Ykwi (Izin No. 1151/411. 42/ Pemsos/ 2013)	11-11-2017 s/d 11-11-2022	Jl. Sakuntala Ujung Nangka, Tangkerang Utara, Bukit Raya - Pekanbaru (Telp. 0761-43263/081378470548)	Hj.Suarsiani
2	PA. Yatim Putra Muhammadiyah (Izin No. 105/1411. 42/ Pemsos/ 2013)	14-10-2017 s/d 14-10-2022	Jl. Tuanku Tambusai No. 14, Kampung Tengah, Sukajadi - Pekanbaru (Telp. 0761-21340/ 081276692519)	Sultan Syahril A.Md / Drs. H. Saadnur, Mm
3	PA. Rumah Kasih Peduli Bangsa Pekanbaru (Izin No. 269/ 411. 42/ Pemsos/ 2014)	8-7-2014 s/d 8-7-2019	Jl. Fajar Ujung No. 59-62, Labuh Baru Barat - Pekanbaru (Telp. 081224757510)	Maria Siregar
4	PA. Kasih Bunda Bersama (Izin No. 17/ 411. 42/ Pemsos/ 2014)	18-7-2014 s/d 18-7-2019	Jl. Karyawan Perumahan Mutiara Hati Blok F/ No. 14 Telp. (0761) 77177831	Lina Br Sianipar
5	PA. Yabes Ardeto (Izin No. - / 411. 42/ Pemsos/ 2014)	7-5-2017 s/d 7-5-2022	Jl. Asfaragas IV/ No. 4 , Sri Meranti, Rumbai - Pekanbaru (Telp. 081276527513)	Hfarida Roma Hutapea
6.	PA. Anak Yatim "Baiturrahman" (Izin No. 1378/ 411. 42/ Pemsos/	19-11-2014 s/d 19-11-2019	Jl. Saomati, Tenayan Raya, RT. 03/ RW. 07, Sail, Tenayan Raya - Pekanbaru (Telp.	Hj. Yenita/ Dr. Alwizar

No	Nama Panti Asuhan	Masa Aktif Panti Asuhan	Alamat	Pendiri/Ketua Panti Asuhan
			081365715169)	
7.	PA. Bhakti Mufaridun (Izin No. 1377/ 411. 42/ Pemsos/ 2014)	18-11-2014 s/d 19-11-2019	Jl. Jend. Sudirman Gang Thawalib, Tanah Datar, Pekanbaru Kota	Dr. H. Sidi Shahril Landerat, Mba
8.	PA. Al - Akbar (Izin No. 1387/ 411.42/ Pemsos/ 2015)	9-11-2015 s/d 9-11-2020	Jl. Kaharudin Nasution No. 66 Maharatu, Marpoyan Damai-Pekanbaru	Yuli Marni (Telp. 081365332924)
9.	PA. Al - Anshor (Izin No. 479/ 411. 42/ Pemsos/ 2015)	21-04-2015 s/d 21-04-2020	Jl. Singgalang Raya No. 313 Tangkerang Timur, Tenayan Raya	Wahyudin Samsul Ridwan
10.	PA. An - Nisa (Izin No. -/ 411. 42/ Pemsos/ 2015)	30-7-2015 s/d 30-7-2020	Jl. Dakota No. 38 , Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai - Pekanbaru	Tri Rahayu
11	PA. Insan Permata (Izin No. 420/ 411. 42/ Pemsos/ 2016)	28-03-2016 s/d 28-03-2021	Jl. Fajar 3 No. 6 Labuh Baru Barat (Telp. 085211315538)	Adriana Keles/Jonedi
12	PA. Al - Ilham (Izin No. 16179/ 411. 42/ Pemsos/ 2016)	13-10-2016 s/d 13-10-2021	Jl. Unggas Simp. Tiga, Kec. Bukit Raya (Telp. 081270595733)	Badinar
13	PA. Al Istiklal (Izin No. 941/ 411. 42/ Pemsos/ 2016)	22-06-2016 s/d 22-06-2021	Jl. Harapan Murni Tangkerang Timur (Telp. 08127617744)	Dodi Ali Emnur
14	PA. Al Fath (Izin No. 319/ 411. 42/ Pemsos/ 2016)	07-03-2016 s/d 07-03-2021	Jl. Indrapuri Ujung, Sail, Tenayan Raya (Telp. 081347304951)	A. Bachtiar/ M. Fajar Sidik
15	PA. AT Thoiba Riau (Izin No. 310/ 411. 42/ Pemsos/ 2016)	07-03-2016 s/d 07-03-2021	Jl. Kapau Sari Ujung, Tangkerang Timur (Telp. 07617748030)	Hj. Rahmi Akamuddin, S.Pd
16	PA. Puteri "Aisyiyah" (Izin No. 1640/ 411. 42/ Pelsos/ 2016)	18-10-2016 s/d 18-10-2021	Jl. Kh. Ahmad Dahlan No 82 Kp. Melayu	Sri Paulina, S. Ag

No	Nama Panti Asuhan	Masa Aktif Panti Asuhan	Alamat	Pendiri/Ketua Panti Asuhan
17	PA. As-Shohwah (Izin No. 1641/411.42/ Pemsos/2016)	18-10-2016 s/d 18-10-2021	Jl. Merpati Sakti No. 11 Simp. Baru (Telp. 081268687045, 081378668331)	Hj. Asparida
18	PA. Anak Al - Hidayah (Izin No. 153/ 411.42/ Pemsos/ 2016)	15-3-2016 s/d 15-3-2021	Jl. Fajar Ujung No. 5, RT. 5/ RW. Xi (Telp 561063/ 7014509/ 08127686005)	Dasren Ps
19	PA. Yayasan Peduli Kese Jah Teraan Anak Yatim Dan Miskin Pekanbaru Al - Fajar (Izin No. 1762/ 411.42/ Pemsos/ 2016)	3-11-2016 s/d 3-11-2021	Jl. Yos Sudarso Km 18,5/ Ikan Raya No. 10, Muara Fajar,Rumbaipekanbaru	Eri Sikumbang
20	PA. Riau Harapan Bersama	21-6-2016 s/d 21-6-2021	Sukoharjo No 21, Sukamulya, Sail	Yuliharni
21	PA. Hikmah (Izin No. 44a/ 463-Dinsos/ 2017)	5-1-2017 s/d 5-1-2022	Jl. Pembangunan/ Kurnia No. 6b Limbungan Baru, Rumbai Pesisir - Pekanbaru (Telp. 081268933399)	Zureida
22	PA. Ar - Rahim (Izin No. 022/ 4.2-Dayasos/ Dinsos/ 2017)	2017-2020	Jl. Garuda Sakti Km. 3 Tampan/ Jl. Tiung	Limi
23	Pa. Ladang Amal (Izin No. 023/ 4.2-Dayasos/ Dinsos/ 2017)	20 Juni 2017- 20 Juni 2020	Jl. Paus/ Melem Gg. H Lima Satu No. 2, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai	Rusdal, St / R. Mudo
24	Yayasan Gerakan Misi Lancang Kuning (Gemilani) Izin No. 4.2-Dayasos/ Dinsos/ 2017/ 026	4 September 2017 - 4 September 2020	Jl. Abadi Arengka No. 15 RT. 10 RW. 3, Delima, Tampan	Endaria Eklesia Ketaren
25	PA. Anugerah Bersinar	PA. Anugerah	Jl. Siak II RT. 01 RW. 09, Tampan, Payung	Simon M. Sitanggang

No	Nama Panti Asuhan	Masa Aktif Panti Asuhan	Alamat	Pendiri/Ketua Panti Asuhan
	Izin No. 4.2- Dayasos/ Dinsos/ 2017/ 025	Bersinar Izin No. 4.2- Dayasos/ Dinsos/ 2017/ 025	Sekaki	
26	Yayasan Kemurahan Agape Izin No. 4.2- Dayasos/ Dinsos/ 2017/ 027	4 September 2017 – 4 September 2020	Jl. Flamboyan IV RT. 03 RW. 10, Delima, Tampan	Ulli Nainggolan
27.	Rumah Yatim Piatu Dan Fakir Miskin "Kasih Ibu" Izin No. 4.2-Dayasos/ Dinsos/ 2017/ 024	4 September 2017 - 4 September 2020	Jl. Garuda No. 64 RT. 04 RW. 05, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai	Martini Some

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui yaitu tercatat sampai tahun 2017 terdapat 27 panti asuhan yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru pembuatan suatu panti asuhan tersebut harus juga memiliki badan hukum, lokasi, serta fasilitas yang memadai seperti tempat tinggal anak, fasilitas anak sekolah dan peralatan anak-anak sekolah, pakaian, makanan yang sudah ada di sediakan di dalam panti.

Tabel 1.2 : Data Penghuni Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Nama Panti	Jumlah Penghuni Panti		
		P	L	Jumlah
1	Pa. Amanah Ykwi	56	42	98
2	Pa Yatim Putra Muhammadiyah	-	34	34
3	Pa. Rumah Kasih Peduli Bangsa Pekanbaru	-	30	30
4	P.A Kasih Bunda Bersama	1	8	9

No	Nama Panti	Jumlah Penghuni Panti		
		P	L	Jumlah
5	Pa. Yabes Ardeto	-	22	22
6	Pa. Anak Yatim "Baiturrahman"	9	8	17
7	Pa. Bhakti Mufaridun	15	15	30
8	Pa. Al – Akbar	25	28	53
9	Pa. Al – Anshor	15	14	29
10	Pa. An – Nisa	29	11	40
11	Pa. Insan Permata	16	14	30
12	Pa. Al – Ilham	29	31	70
13	Pa. Al Istiklal	20	30	50
14	Pa Al Fatih	27	27	54
15	Pa. At Thoiba Riau	6	16	22
16	Pa. Puteri “Aisyiyah “	35	-	35
17	Pa. As – Shohwah	20	23	43
18	Pa. Anak Al – Hidayah	25	35	60
19	Pa. Yayasan Peduli Kesejahteraan Anak Yatim Dan Miskin Pekanbaru Al – Fajar	-	30	30
20	Pa. Riau Harapan Bersama	10	7	17
21	Pa. Hikmah	6	9	15
22	Pa. Ar – Rahim	17	23	40
23	Pa. Ladang Amal	10	-	10
24	Pa. Yayasan Gerakan Lancang Kuning (Gemilani)	4	2	6
25	Pa. Anugerah Bersinar	14	12	26
26	Pa. Yayasan Kemurahan Agape	11	6	17
27	Pa. Rumah Yatim Piatu Dan Fakir Miskin “ Kasih Ibu”	5	7	12

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 27 panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru, panti asuhan Amanah Ykwi memiliki penghuni panti terbanyak yaitu sebanyak 98 orang yang terdiri dari 56 anak perempuan dan 42 orang anak laki-laki dan di ikuti dengan panti Al-Ilham dengan jumlah penghuninya 70 orang terdiri dari 29 anak perempuan dan 31 anak laki laki . Sedangkan panti asuhan yayasan gerakan lancang kuning (Gemilani) memilki

penghuni panti sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Pekanbaru No 97 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- d. Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- e. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- f. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- g. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Kemudian ada tiga bidang dalam dinas sosial Kota Pekanbaru yaitu:

1. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

2. Bidang rehabilitasi Sosial
3. Bidang pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terbagi menjadi tiga seksi antara lain :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Dan Restorasi Sosial.

Seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya yaitu Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan terhadap organisasi sosial/lembaga sosial masyarakat/yayasan. Panti sosial, kelompok bermain dan taman penitipan anak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Selain itu juga harus melakukan perumusan dan penyediaan sarana dan prasarana organisasi/lembaga social, pembinaan peran kelembagaan social masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat serta pelayanan jaminan kesejahteraan social dan penyuluhan social.

Pengawasan menurut Siagian (2008:112) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi pengawasan terdiri dari semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan dan evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai sejauh mana

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan pemimpin. Sehingga penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang terpenting., pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan menerapkan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan arti penting proses pengawasan adalah suatu upaya melakukan pemantauan terhadap sebuah kegiatan atau aktifitas sehingga dapat dilakukan pencegahan dan perbaikan atas penyimpangan, kesalahan, atau penyelenggaraan yang terjadi.

Tugas dan Fungsi pengawasan terhadap panti asuhan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu pada seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat yang diatur oleh Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada pasal 22 yaitu melakukan pengawasan terhadap LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Asuhan). Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu :

1. Monitoring evaluasi
2. Pemberian Sosialisasi
3. Pemberian pembekalan tentang akreditasi Panti Asuhan.

Dan dasar hukum yang melakukan pengawasan telah di atur di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,Peraturan menteri Sosial RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Tabel 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terhadap ORSOS/Yayasan/LKS

No	Pelaksana	Uraian kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kasi	Menerima dan menindaklanjuti surat yang telah didisposisi pimpinan serta mengkonfirmasi surat yang akan ditindak lanjut kepada pihak terkait tentang keberadaan Orsos/LKS	ATK, surat dasar dan bukti pendukung	2 hari	Konsep surat dan SPT tim
2	Staf	Mengetik konsep pembuatan surat tindak lanjut dan SPT tim yang diberikan	ATK, computer dan printer	15 menit	Konsep surat balasan
3	Kasi	Memeriksa dan mengoreksi pengetikan konsep pembuatan surat tindak lanjut dan memaraf surat	ATK, Surat tindak lanjut	10 menit	Konsep surat balasan yang telah di paraf
4	Kabid	Memeriksa dan mengoreksi konsep pembuatan surat tindak lanjut dan selanjutnya memaraf serta menyerahkan ke Sekretariat Dinas	ATK, Konsep surat tindak lanjut	5 menit	Konsep surat balasan yang di paraf
5	sekretaris	Memeriksa dan	ATK, Konsep	5 menit	Konsep

No	Pelaksana	Uraian kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output
		mengoreksi konsep pembuatan surat tindak lanjut	surat tindak lanjut		surat balasan yang di paraf

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada 2 jenis antara lain :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan (panti-panti asuhan) yang ada di Kota Pekanbaru dengan cara Dinas Sosial pada seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat membentuk tim untuk melakukan pengawasan secara langsung disetiap panti asuhan. Pengawasan langsung ini dilakukan 1 kali dalam setahun bergantian ke setiap panti-panti di pekanbaru. Selain itu setiap panti asuhan diwajibkan untuk membuat laporan setiap bulannya kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Laporan tersebut berisi tentang kondisi penghuni panti asuhan, sarana dan prasarana panti asuhan, kegiatan-kegiatan panti asuhan dan pendanaan panti asuhan. Arti penting dilakukan pengawasan di panti asuhan yaitu sebagai tanggung jawab Dinas Sosial yang mempunyai tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap panti asuahn yang ada diwilayahnya guna mengontrol bagaimana panti asuhan melaksanakan program-program kerja yang telah panti buat dan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial terhadap anak-anak yang ada di

panti asuhan. Dan hasil pengawasan untuk panti asuhan yaitu sebagai tombak acuan dan kontrol panti asuhan agar bisa berjalan dengan baik dan pihak panti bisa memberikan keluhan kesah atau harapan bantuan kepada pihak Dinas Sosial.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini berbentuk laporan-laporan adanya kejanggalaan atau penyimpangan sosial di panti asuhan dari masyarakat kepada Dinas Sosial. Kemudian laporan masyarakat akan diproses oleh Dinas Sosial terkait dan pihak Dinas Sosial akan turun ke panti asuhan untuk menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang ada.

Tabel 1.4 : Penetapan Anggota Tim Monitoring LKS Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Nama	Unsur Pilar-pilar Dinsos
1	Ronal Junifer. S	Peksos Dinsos
2	Rivdya Milyarni Putri	Peksos Dinsos
3	Sri Dewi	PSM Kota Pekanbaru
4	Febby Azra Yudha	PSM Kota Pekanbaru
5	Roro Wilis Irene	PSM Kota Pekanbaru
6	Yeni Astuti	PSM Kota Pekanbaru
7	Lesi Lesmana	PSM Kota Pekanbaru
8	Lani Noferiza	PSM Kota Pekanbaru
9	Muslianis	PSM Kota Pekanbaru
10	Roni Januar	PSM Kota Pekanbaru
11	M. Darwis	PSM Kota Pekanbaru
12	Arif Sudirman	PSM Kota Pekanbaru

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

Tabel 1.5 : Jadwal Dinas Sosial Melakukan Pengawasan Ke Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

No	Tanggal Pengawasan	Nama Panti Asuhan
1.	7 November 2017	1. PA. Harapan 2. PA. Ladang amal 3. PA. Fajar harapan 4. PA. Al athar.
2.	9 November 2017	1. PA. Putra anisa 2. PA. Gemilang 3. PA. Arohim 4. PA. Al-hidayat
3.	13 November 2017	1. PA. Putri aisyiyah 2. PA. Putra Muhammadiyah 3. PA. Mufaridun 4. PA. Al-ilham
4.	21 November 2017	1. PA. Alihram 2. PA. Takdir Ilahi 3. PA. Yabesardeto 4. PA. Al-Fajar
5.	4 Desember 2017	1. PA. Alfatih 2. PA. Baiturahman 3. PA. Istiqlal 4. PA. At-Taibah 5. PA. Al-Anshori 6. PA. Amanah Ykwi
6.	5 Desember 2017	1. PA. Kemurahan 2. PA. As-Shohwah 3. PA. Anugrah Bersinar 4. PA. Kasih Bunda

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Sosial telah menjadwalkan pelaksanaan pengawasan terhadap 27 panti yang ada di Kota Pekanbaru secara bergantian ke setiap panti-panti yang ada di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 Dinas Sosial menjadwalkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan pada akhir tahun sekitar bulan November dan Desember. Adanya dilakukan pengawasan terhadap panti guna mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ada di dalam

panti tersebut seperti apakah panti sudah melaksanakan seharusnya yang dilakukan di dalam untuk merawat anak-anak di dalam panti dengan baik

Kegiatan yang ada di Panti Asuhan antara lain :

1. Pemeliharaan anak-anak terlantar
2. Peningkatan kemampuan fakir miskin
3. Rehabilitasi cacat mental

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa fenomena antara lain :

1. Adanya beberapa bangunan yang sudah tidak layak pakai dan kapasitas tampungnya terlalu banyak tidak sesuai antara ukuran kamar dengan jumlah anak yang menempatnya, serta kurangnya media pembelajaran untuk anak.
2. Kurangnya perhatian terhadap makanan yang dikonsumsi oleh anak dan kebutuhan kesehatan anak seperti pemberian vaksin, imunisasi, vitamin dan lainnya.
3. Kurangnya kapasitas jumlah pengasuh anak dipanti asuhan.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Pekanbaru. salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah penyelenggaraan dan penanganan bidang di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa perlunya pengawasan dari Dinas Sosial pada panti-panti asuhan di Kota Pekanbaru, agar pengelolaan panti asuhan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan sosial. Oleh karena itu peneliti merumuskan suatu masalah yaitu : **“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru “.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Dinas Sosial dalam Pengawasan Terhadap Panti Asuhan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik.
- b. Kegunaan Empiris yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan judul terkait.

- c. Kegunaan Praktis yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan terutama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mengawasi pengelolaan Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, didalam Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration*, yang berarti “pemeberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Administrasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafei, 2003 :5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi menurut Zulkifli (2009 ; 8) adalah mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Admosudirjo (didalam Zulkifli, 2009;11) Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep Administrasi, yaitu :

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensinya daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah "*administrator*" yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para menejer, staffer, dan personal lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para menejer dan staffer.
4. Administator merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinana' dari pada suatu organisasi.
5. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
7. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behavior or administration as spesial type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behaviour*).
8. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang

memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skills*) yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan keterampilan.

9. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
10. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan '*overall management*' daripada suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resources*) dimaksud meliputi : orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara-teknik (*methode-technology*), ruang (*space*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggungjawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2008 ; 21) adalah didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960 ; 57) adalah orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama.

Administrasi menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg & A. Thomson (1970 ; 18) adalah dalam arti luas, administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari batasan ini dapat diungkap tiga ide pokok, yakni sebagai berikut :

1. Administrasi adalah rangkaian kegiatan.
2. Kegiatan itu dilaksanakan dalam kerangka kerja sama kelompok.
3. Kerangka kerja sama kelompok itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Administrasi menurut John A. Vieg dalam Frizt Morstein Max (1959 ; 59) adalah tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari. Batasan di atas mengidentifikasi dua hal, yaitu :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan atau direncanakan
2. Kegiatan itu dilakukan untuk mencapai maksud yang dikehendaki

Administrasi menurut Brooks Adams (1913 ; 76) adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan – kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Dari batasan di atas dikemukakan ide pokok sebagai berikut :

1. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan – kekuatan sosial di dalam satu organisasi
2. Kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan / keseluruhan organisme.

Administrasi menurut Leonard D. White (1958 ; 35) adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau private, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut.

1. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan)
2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok

Administrasi menurut E. N. Gladden (1953 ; 26) adalah mendefinisikan administrasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar lingkungan publik, di dalam masyarakat mana pun.

Administrasi menurut Dwight Waldo (1948 ; 21) adalah usaha kerja sama yang rasional dan tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasi tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian / pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki. Orang dapat memaksimalkan usaha – usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menghubungkan dengan cermat antara sarana / usaha dan tujuan / hasil. Ide pokok pendapat Waldo di atas adalah sebagai berikut :

1. Administrasi adalah kegiatan
2. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sekelompok orang.
3. Rangkaian kerja sama itu dilakukan secara efisien
4. Rangkaian kegiatan kerja sama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pokok yang terkandung dalam administrasi adalah :

- a. Kegiatan
- b. Kerja sama sekelompok orang
- c. Tujuan
- d. Efisiensi

Administrasi menurut Syafri (2012; 11) adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Administrasi menurut Liang Gie (dalam Mufiz; 2004, 14) adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerja

sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerja sama manusia.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan unsur pertama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Sebagai wadah, organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang – orang pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Organisasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Sofyandi, 2007:3) adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Winardi (2009;43) juga mengemukakan pengertian organisasi, organisasi adalah sebuah wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang

senantiasa terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bekerjasama sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama.

Dimana unsur-unsur organisasi (6M) yaitu sebagai berikut:

- a. *Man* atau manusia, dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia.
- b. *Money* atau uang, uang merupakan sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan didalam organisasi juga membutuhkan financial.
- c. *Method* yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine* yang artinya mesin. Maknanya bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran bergeraknya suatu organisasi.
- e. *Material* adalah materi, bahan dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market* merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Organisasi menurut Malayu Hasibuan (2001 ; 116) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Ada pun unsur – unsur organisasinya yaitu :

1. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipinpin.
2. Tempat kedudukannya, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya

3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan
5. Strukturnya, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya
6. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis
7. Lingkungan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial

Organisasi menurut Chestel I. Barnard (dalam Manulang, 2006; 59) adalah suatu sistem kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Oranisasi menurut James D. Mooney (dalam manulang 2006; 59) adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun definisi menurut Zulkifli (2009; 38) menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Massien (dalam Zulkifli, 2009; 78) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas – tugas diantara para anggota, menetapkan hubungan – hubungan kerja dan menyatukan aktivitas – aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (dalam hendry, 2015; 14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Dari batasan makna organisasi ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi sebagai wadah dimana kegiatan – kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hirarki antara orang – orang dalam suatu ikatan formal sebagai wadah administrasi relatif bersifat statis, sedangkan sebagai suatu rangkaian hirarki organisasi merupakan suatu proses, dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

Organisasi bersifat terbuka dan dinamis, merupakan suatu proses terdiri dari masukan, keluaran, transformasi, umpan balik dan batasan – batasan tertentu. Berhubung dia harus bereaksi terhadap setiap umpan balik, maka organisasi selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam setiap aktivitas. Organisasi juga memiliki atau terdiri dari sejumlah fungsi dan tujuan, yang beberapa diantaranya cenderung berada dalam situasi konflik, dan adalah tugas para ‘administrator’ untuk selalu menjaga dan mempertahankan keseimbangan diantaranya.

Organisasi menurut Koontz dan O’Donnel (dalam Hasibuan, 2006 : 121) adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun secara horizontal diantara posisi – posisi yang telah disertai tugas – tugas khusus yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan structural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu – individu berusaha, dikoordinasi.

Organisasi menurut Atmosudiro (dalam Hasibuan, 2006 : 121) adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama – sama mencapai suatu tujuan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain Siagian (1985:5) artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari Administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Apabila dilihat dari segi fungsional administrasi mempunyai dua tugas utama yaitu:

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (*organizational goal*).
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (*general and overall policies*).

Sebaliknya manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam ranmgka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan bahwa manajemen merupakan aspek dari administrasi dan oleh karena itu administrasi lebih luas daripada manajemen.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut siagian (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Liang Gie (didalam Zulkifli, 2009;16), manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Menurut John D (Siswanto1987;4) manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada oarang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel(1986;4) manajemen adalah proses perencanaan,pengorganisasian,kepemimpinan,dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi blainnya demi tercapainya tujuan organisasi

Menurut Siswanto (2005;9) manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistemastisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran,kemampuan,serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya

alam (human and natural resource) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas, pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu manajemen.

Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia, maka sumber daya manusia dapat lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan organisasi seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menggerakkan atau memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang lainnya untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya Hasibuan (2012:7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan unsur-unsur itu antara lain adalah:

- ❖ Man : Man dalam organisasi publik di artikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- ❖ Money : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- ❖ Material (bahan- bahan pelengkap) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- ❖ Machines (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerja, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- ❖ Methode (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada acara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerja.
- ❖ Market : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangannya unsur *man* (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu *man* (manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Selanjutnya Martoyo (2000:25) yang mengatakan bahwa aktifitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu, manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personal (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional (dalam Faustino, 2003:4).

5. Konsep Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan begitu penting untuk dilakukan mengingat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen guna menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan setiap organisasi adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. Pengawasan itu harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkat kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Selain itu fungsi manajemen lainnya adalah perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik pula.

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2005:207), pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah ditentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan

sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih di anggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai

sebagaimana semestinya. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa manajemen membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang kerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan dalam mana organisasi beroperasi. Dan untuk membantu manajer, memperidiksi, memonitor, dan menentukan perubahan-perubahan kondisi. Hasilnya menjadi masukan bagi perencanaan dan ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan kotrol.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan tercakup fungsi pengawasan (*Controlling*). Fungsi ini merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Pengawasan menurut Terry (dalam Zulkifli 2005;204) adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam Zulkifli dan Yogia 2014;137) yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan Laporan dan data statistik).
3. Pengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Keterkaitan pelaksanaan sistem pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat dicermati melalui pemahaman terhadap pendapat William H Newhan (Zulkifli dan Yogi 2014;137) tentang langkah- langkah dasar fungsi pengawasan. Newhan mengemukakan lima langkah dasar yang dapat diterapkan terhadap semua jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Terapkan nilai-nilai yang ingin di capai.
2. Terapkan peramal hasil-hasil (indikator hasil-hasil) seperti
 - a. Pengukuran input,
 - b. Hasil-hasil langkah awal,
 - c. Gejala-gejala,
 - d. Perubahan dalam kondisi yang di awal,
3. Terapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil.
4. Terapkan jaringan informasi dan umpan balik.

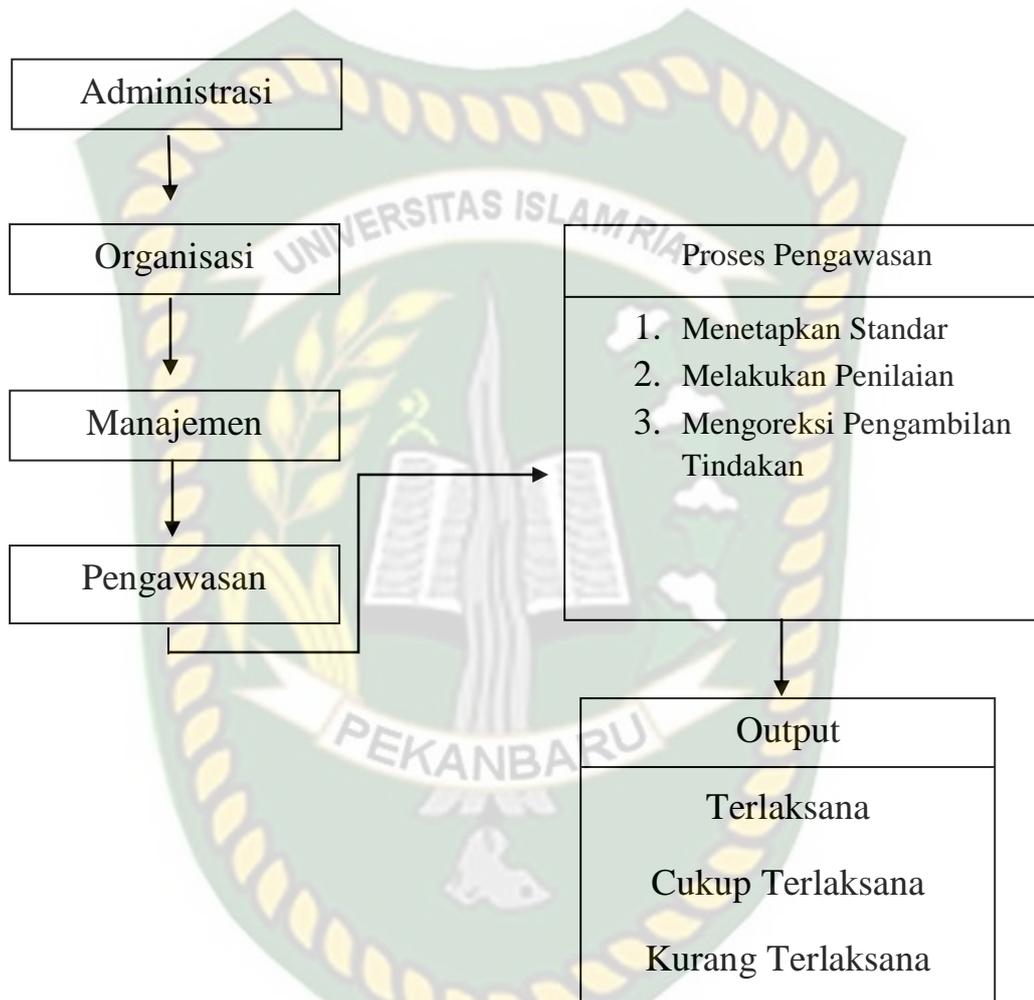
5. Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan yaaitu :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima pelaksana baik secara lisan atau tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Model Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk dapat memberi penjelasan mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial di panti asuhan di Kota Pekanbaru. Untuk menghilangkan serta untuk menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep atau pun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan kedalam konsep operasional.

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru.sebagai berikut :

Dalam penelitian ini maka didefinisikan secara umum indikator tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Administrasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan, agar memperoleh tujuan secara efektif dan efisien.
- b. Organisasi adalah sebagai tempat wadah dimana sekelompok orang yang melaksanakan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.
- c. Manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain
- d. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

- e. Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.
- f. Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah merupakan kegiatan profesional membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.
- g. Panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau piatu.
- h. Menetapkan standar adalah penetapan tolok ukur atau patokan dasar di dalam pengawasan.
- i. Melakukan Penilaian yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pengawasan.
- j. Mengoreksi Pengambilan Tindakan adalah suatu langkah untuk menentukan solusi dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- k. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan.
- l. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tidak turun ke lapangan secara langsung tetapi dengan mempelajari laporan-laporan yang ada dari masyarakat.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan . Menurut Terry (dalam buku Zulkifli 2009;134)	Proses Pengawasan	1. Menetapkan Standar	a. Melakukan sosialisasi mengenai Dinas Sosial terhadap panti asuhan b. Pelaksanaan pengawasan terhadap panti asuhan yang dilakukan Dinas Sosial	Terlaksana Cukup Terlaksana kurang Terlaksana
		2. Melakukan Penilaian	a. Memantau permasalahan pengawasan di panti asuhan b. Melakukan pelaksanaan pengawasan di lapangan c. Menetapkan personil lapangan untuk melakukan pengawasan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
		3. Mengoreksi Pengambilan Tindakan	a. Pemberian koreksi kinerja kepada petugas terkait pelaksanaan pengawasan terhadap panti asuhan b. Mengetahui penyimpangan yang terjadi c. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Modifikasi Peneliti 2019

E. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran yang digunakan dalam variabel penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru. Dengan indikator – indikator variabel sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila hasil indikator dalam pelaksanaan pengawasan dinas sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru.dengan persentase pencapaian keberhasilan berkisar 67 – 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil indikator dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru.dengan persentase pencapaian keberhasilan berkisar 34 – 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hanya satu atau pun tidak satu pun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase 1 – 34%.

Selanjutnya untuk melakukan pengukuran terhadap setiap indikator maka dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Menetapkan Standar

Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase > 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 1% - 33%.

2. Melakukan Penilaian

Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase > 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 1% - 33%.

3. Mengoreksi Pengambilan Tindakan

Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase > 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penelitian telah dapat dilaksanakan jawaban responden berada pada persentase 1% - 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung digambarkan dari hasil penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dan juga dari jawaban responden tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif Menurut Sugiyono (2010;6), adalah penelitian yang menggunakan data angka-angka serta selanjutnya dianalisa secara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena merupakan yang bertugas, memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengeluarkan izin dan menetapkan program kerja dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial pada Panti Asuhan di Kota Pekanbaru Alasan dari peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut karna penulis menemukan adanya fenomena yang masih terdapat di dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru yang dahulu sampai saat ini sosialisasi Dinas Sosial di Panti Asuhan belum terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. (Bungin, 2005:109)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Dan Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat beserta Pemilik Panti Asuhan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Sampel diambil untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan representatif.

Tabel III.1: Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	12 Orang	12 Orang	100%
4.	Pemilik Panti Asuhan	27 Orang	27 Orang	100%
	Jumlah	41 Orang	23 Orang	

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam Pelaksanaan Pengawasan

Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru untuk Kepala Dinas dan Kepala Seksi pemberdayaan social kelembagaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2012:85) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini karena jumlah populasinya relatif kecil. . Untuk pegawai Seksi pemberdayaan social kelembagaan masyarakat dan pemilik panti asuhan menggunakan Sampling Jenuh (Sugiyono, 2012:85).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan bukit di Kota Pekanbaru.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui daftar pertanyaan atau wawancara yang mencangkup terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Dinas Sosial kemudian diolah menjadi sebuah informasi, serta keseluruhan merupakan data – data yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lain sebagainya mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru Kuesioner / angket.

Yaitu data yang diperoleh melalui pertanyaan yang akan dijawab oleh para responden yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dari responden dengan cara membuat beberapa pertanyaan dan alternatif jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan dan pengetahuan responden.

2. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mewawancarai guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan kusioner yang meliputi pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru Teknik Dokumentasi.

Yakni pengumpulan data berupa dokumen penelitian yang berkaitan dengan peksanaan pengawasan Dinas Sosial pada panti asuhan di Kota Pekanbaru

3. Kuesioner

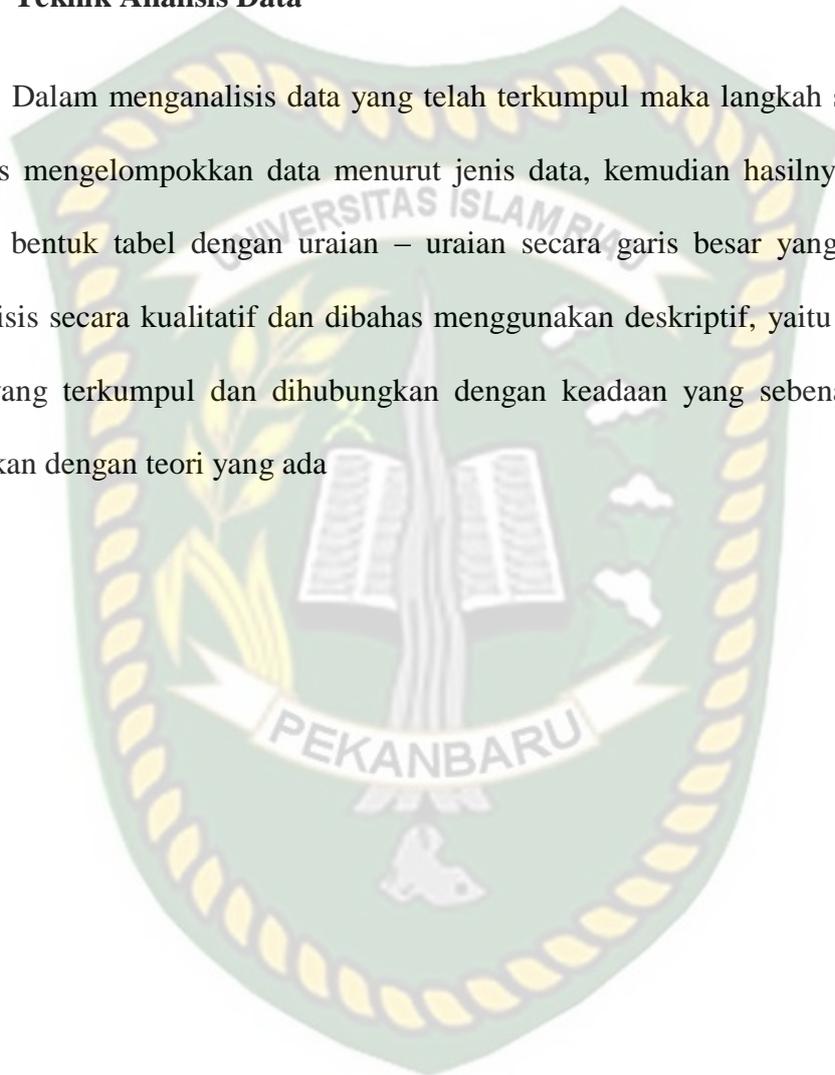
Kuesioner adalah memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan media tertentu untuk mengabadikan suatu momen, baik foto, rekaman dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul maka langkah selanjutnya penulis mengelompokkan data menurut jenis data, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dengan uraian – uraian secara garis besar yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dibahas menggunakan deskriptif, yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta dikaitkan dengan teori yang ada



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Pemakaman

Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepaskan begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kedua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana pejuang Indonesia telah mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara tahun 1947-1950. Dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan sehingga banyak rakyat mengungsi. Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan diperlukan bantuan yang kontinyu untuk menyuplai logistik dan pemakaman.

Pada tahun 1998, departemen sosial pernah dibubarkan oleh presiden KH. Abdulrahman Wahid, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun

1999, dihidupkan kembali departemen sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial dihidupkan kembali oleh presiden Megawati Soekarno Putri. Dan pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang, 15 Seksi dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah, dimana Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

B. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah”.

2. Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dari visi diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Kerja.
- d. Mensejahterakan bantuan Kesejahteraan Sosial.
- e. Mengembangkan /meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara Optimal dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- f. Mewujudkan Pemakaman yang Tertib dan Indah.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lansia
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - c. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Nafza dan Hukuman
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
5. Bidang Bantuan Sosial
 - a. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
 - b. Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
 - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Pengumpulan dana Sosial
6. Bidang Pemakaman

- a. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman

Struktur organisasi ini berlaku selama 7 bulan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan kemudian keluar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Wali Kota, struktur organisasi kebutuhan dan tugas pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman.
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan pemakaman.
- e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan Dinas.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan penyetoran rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.

h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.

i. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

j. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

l. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

m. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dinas.

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan,

kepegawaian, tata peraturan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.

- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas.
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan.
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia, dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

f. Menkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja.

b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.

c. Pengkoordinasian inventaris data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

d. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pembinaan lanjut, pelayanan sosial.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

1) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Nafza dan Hukuman mempunyai rincian tugas-tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja.

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak nakal, korban dan eks hukuman.

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data anak nakal dan eks korban napza serta eks hukuman.

f. Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial dan pembinaan kepada anak nakal dan eks korban napza serta eks hukuman.

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis dan anak nakal, eks korban napza dan eks hukuman.

h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi anak nakal, eks korban napza dan eks hukuman.

i. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada dibidang tugasnya.

j. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.

k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan-bahan yang akan dilaporkan, masalah yang

dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi anak nakal, eks korban napza dan eks hukum dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Penginventarisasian, identifikasi data anak nakal dan eks korban napza serta eks hukuman.
- c. Pencegah, rehabilitasi sosial dan pembinaan kepada anak eks korban napza serta eks hukuman.
- d. Pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis.

- e. Pelayanan umum.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan secara berkala.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang cacat mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan dipergunakan.

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.

d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidang tugasnya.

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data penyandang cacat.

f. Merumuskan dan melaksanakan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan penyandang cacat.

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang cacat.

h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat.

i. Merumuskan dan mengirimkan penyandang cacat ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kecacatannya.

j. Merumuskan dan melaksanakan pemberian alat bantu penyandang cacat sesuai dengan kecacatannya.

k. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan saranandan prasarana serat peningkatan pemeliharaan gedung Loka Bina Karya (LBK).

l. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang cacat.

m. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.

n. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Peyusunan program kerja.
- b. Penginventarisasian, identifikasi data penyandang cacat.
- c. Pemberdayaan penyandang cacat.
- d. Pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang cacat.
- e. Peningkatan pemeliharaan gedung Loka Bina Karya (LBK).
- f. Pembinaan kelompok usaha bersama penyandang cacat.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.

- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.

- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program

dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidang tugasnya.

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data, penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan, pengemis, dan waria).

f. Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan dan pengemis, waria).

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial (eks, WTS, gelandangan dan pengemis, waria).

h. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang tuna sosial.

i. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.

j. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada dibidang tugasnya.

k. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.

l. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Penginventarisasian, identifikasi data penyandang tuna sosial.
- c. Pencegahan penertiban.
- d. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial (eks WTS, gelandangan dan pengemis, waria)
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

5. Bidang Bantuan Sosial

Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial.

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan masa, dan tindak kekerasan.

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda.

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bantuan sosial dalam melaksanakan rincian fungsi sebagaimana yang dimaksud :

- a. Penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial.
- b. Pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial.
- c. Pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- d. Pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

6. Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka pungutan retribusi.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemakaman.
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman, serta peta penggunaan tanah pemakaman.

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemakaman dalam melaksanakan rincian fungsi sebagaimana yang dimaksud :

a. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman.

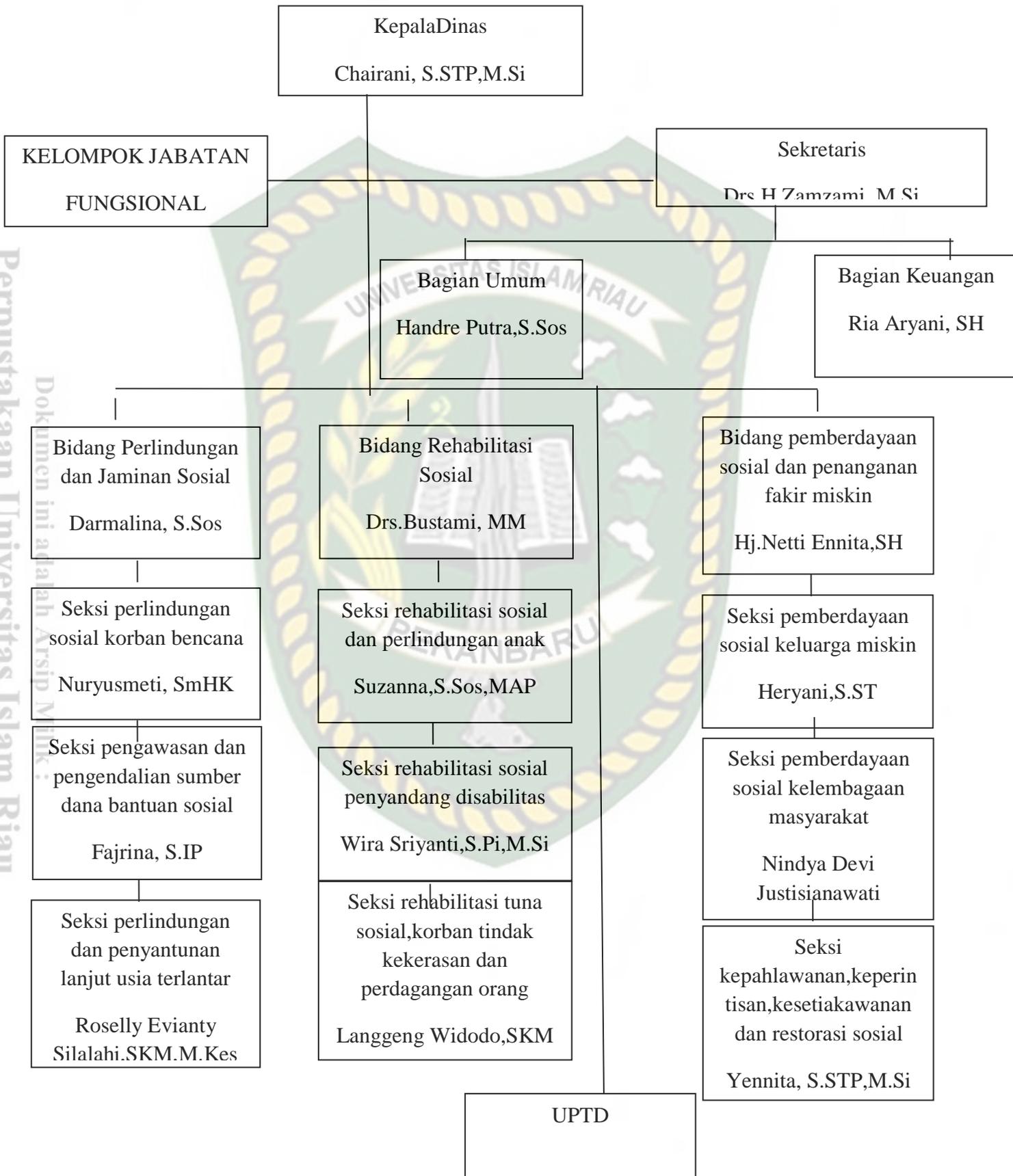
b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman.

c. Pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman.

- d. Pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.



D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan juga menyebarkan kuisisioner sebanyak 39 rangkap kepada pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pengelola panti asuhan di Kota Pekanbaru. Adapun identitas responden yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin (Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	5 orang	42 %
2	Perempuan	7 orang	58 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari hasil data yang diidentifikasi pada tabel V.1 tersebut diatas maka dapat diterangkan bahwa jumlah responden laki-laki 5 orang (42%) sedangkan jumlah responden perempuan 7 orang (58%). Dari keseluruhan responden Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 12 orang.

Tabel V.2 : Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin (Pengelola Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru)

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	10 orang	37%
2	Perempuan	17 orang	63%
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari hasil data yang diidentifikasi pada tabel V.2 tersebut diatas maka dapat diterangkan bahwa jumlah responden laki-laki 10 orang dengan persentase 37%, sedangkan jumlah responden perempuan 17 orang dengan persentase 63%. Dari keseluruhan responden Pengelola Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru berjumlah 27 orang.

2. Identitas responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertindak laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir

serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Data responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Klasifikasi responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir (Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

No	Tingkat pendidikan	Pegawai	Persentase
1	SD	-	%
2	SMP	-	%
3	SMA	4 orang	33%
4	DIPLOMA	2 orang	17%
5	SARJANA	6 orang	50%
Jumlah		12 orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan dari masing-masing responden adalah yang memiliki tingkat pendidikan SMA / Sederajat sebanyak 4 orang (33%), yang memiliki tingkat pendidikan DIPLOMA sebanyak 2 orang (17%).dan tingkat pendidikan SARJANA sebanyak 6 orang (50%).

Tabel V.4 : Klasifikasi responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir (Pengelola Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru)

No	Tingkat pendidikan	Masyarakat	Persentase
----	--------------------	------------	------------

No	Tingkat pendidikan	Masyarakat	Persentase
1	SD	-	-%
2	SMP	3 orang	11%
3	SMA	19 orang	70%
4	DIPLOMA	1 orang	4%
5	SARJANA	4 orang	15%
Jumlah		27	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam. Tingkat pendidikan pada masyarakat untuk tingkat SMP sebanyak 3 orang (11%), tingkat SMA sebanyak 19 orang (70%), tingkat Diploma sebanyak 1 orang (4%) dan tingkat Sarjana sebanyak 4 orang (15%).

3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan.

Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan daripada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel V.5

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.5 : Klasifikasi responden berdasarkan latar belakang usia
(Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru)**

No	Klasifikasi Responden (usia)	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	6 orang	50%
2	31-40 Tahun	4 orang	33%
3	41-50 Tahun	2 orang	17%
4	>50 Tahun	-	%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Pada tabel V.5 diatas, maka dapat kita lihat sebagian besar responden penelitian ini dapat diterangkan bahwa umur responden yang paling banyak yaitu antara 20-30 tahun sebanyak 6 orang (50%), 31-40 tahun sebanyak 4 orang (33%), dan 41-50 tahun sebanyak 2 orang (17%) Diharapkan dengan usia yang masih produktif ini pegawai lebih semangat dan kerja keras dalam memberikan pelayanan.

**Tabel V.6 : Klasifikasi responden berdasarkan latar belakang usia
(Pengelola Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru)**

No	Klasifikasi Responden (usia)	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	-	%
2	31-40 Tahun	11 orang	42%

No	Klasifikasi Responden (usia)	Jumlah	Persentase (%)
3	41-50 Tahun	14 orang	51%
4	>50 Tahun	2 orang	7%
Jumlah		27	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Pada tabel diatas, maka dapat kita lihat sebagian besar responden pengelola panti asuhan penelitian ini dapat diterangkan bahwa umur responden yang paling banyak yaitu antara 41-50 tahun sebanyak 14 orang (51%), selanjutnya 31-40 tahun sebanyak 11 orang (42%) dan terakhir adalah usia >50 tahun sebanyak 2 orang (7%).

B. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota

Pekanbaru

Untuk mengetahui bagaimana tingkat Pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap Panti Asuhan, maka pada uraian berikut penulis akan jelaskan berdasarkan pelaksanaan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Maksudnya adalah penetapan tolok ukur atau patokan dasar di dalam proses pengawasan. Adapun yang menjadi item yang dinilai dari Menetapkan Standar ini antara lain : melakukan sosialisasi terhadap panti asuhan, pelaksanaan pengawasan terhadap panti asuhan, kuantitas jumlah pegawai dalam pelaksanaan pengawasan, kualitas proses pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pujian ini maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.7 : Tanggapan responden Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Penetapan Standar pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sosialisasi terhadap panti asuhan	4 (33%)	5 (42%)	3 (25%)	12
2	Pelatihan tentang standar panti asuhan	0 (0%)	4 (33%)	8 (67%)	12
3	Penerapan standar panti asuhan	3 (25%)	4 (33%)	5 (42%)	12
4	Jumlah pegawai yang melakukan pengawasan	2 (17%)	6 (50%)	4 (33%)	12
5	Pelaksanaan proses pengawasan	6 (50%)	6 (50%)	0 (%)	12
6	Jadwal pelaksanaan pengawasan	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12
Jumlah		23	29	20	72
Rata-rata		4	5	3	12
Persentase		33%	42%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 12 responden Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap enam item yang dinilai yaitu ,sosialisasi terhadap panti asuhan pada kategori terlaksana ada 4 orang dengan persentase 30%, selanjutnya

pada kategori cukup terlaksana ada 5 orang dengan persentase 42%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 3 orang dengan persentase 28%, dikarenakan sosialisasi terhadap panti asuhan sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif.

Untuk item penilaian kedua yaitu pelatihan tentang standar panti asuhan untuk kategori terlaksana adalah 0, dikarenakan memang tidak adanya dilakukan pelatihan terhadap pegawai apalagi kepada pihak panti asuhan. selanjutnya kategori cukup terlaksana ada 4 orang dengan persentase 33%, sedangkan kategori kurang terlaksana ada 8 orang dengan persentase 67%. Dikarenakan pelatihan tentang standar panti asuhan memang tidak ada dilaksanakan oleh pihak dinas.

Untuk item penilaian ketiga yaitu penerapan standar panti asuhan untuk kategori terlaksana ada 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan panti asuhan telah menerapkan standar yang baik. selanjutnya kategori cukup terlaksana ada 4 orang dengan persentase 33%,dikarenakan panti asuhan telah menerapkan standar yang cukup baik, sedangkan untuk kategori kurang terlaksana ada 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan panti asuhan masih belum bisa menerapkan standar panti asuhan yang baik dengan beberap faktor kendalanya.

Untuk item penilaian keempat yaitu jumlah pegawai yang melakukan pengawasan pada kategori terlaksana ada 2 orang dengan persentase 17%, dikarenakan jumlah pegawai sudah memadai untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 6 orang dengan persentase 50%, dikarenakan pada saat melakukan pengawasan jumlah pegawai sudah cukup memadai, sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 4 orang dengan

persentase 33%, dikarenakan jumlah pegawai pengawas panti asuhan masih sangat minim sehingga kurang efektif dalam proses pengawasan.

Untuk item penilaian kelima yaitu pelaksanaan proses pengawasan pada kategori terlaksana ada 6 orang dengan persentase 50%, dikarenakan proses pengawasan sudah terlaksana dengan efektif. Selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 6 orang dengan persentase 50%, dikarenakan proses pengawasan sudah berjalan cukup efektif, sedangkan pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Karena proses pengawasan di panti asuhan sudah terlaksana dengan baik.

Untuk item penilaian keenam yaitu jadwal pelaksanaan pengawasan pada kategori terlaksana ada 8 orang dengan persentase 67%, dikarenakan jadwal pengawasan sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak dinas dan sebelumnya juga sudah diberitahukan kepada pihak panti asuhan dengan jadwal pelaksanaan pengawasan tersebut. Selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 4 orang dengan persentase 33%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Karena jadwal pengawasan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Sosial.

Dari serangkaian uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden pada indikator menetapkan standar sudah cukup terlaksana dengan tingkat persentase 42%, sedangkan kategori terlaksana hanya 33% dan kategori kurang terlaksana 25%. Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru di panti asuhan Kota Pekanbaru dalam indikator Menetapkan Standar

sudah cukup terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis terhadap beberapa item yang dinilai yaitu sosialisasi terhadap panti asuhan, pelatihan tentang standar panti asuhan, penerapan standar panti asuhan, jumlah pegawai yang melakukan pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Dari hasil observasi penulis, dari beberapa item yang dinilai di atas pegawai dinas telah melaksanakan item-item penilaian pada indikator Menetapkan Standar dengan cukup terlaksana, misalnya pegawai telah memaparkan indikator-indikator yang akan di awasi di panti asuhan, kemudian jadwal pengawasan yang rutin dan jumlah pengawas yang memadai. Tetapi pada item ke dua yaitu tentang adanya pelatihan khusus untuk pemilik panti mengenai standar panti asuhan yang baik itu tidak ada diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pengurus panti asuhan yang berjumlah 27 orang terhadap indikator Menetapkan Standar. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel V.8 berikut ini :

Tabel V.8 : Tanggapan responden Pengelola Panti Asuhan tentang Penetapan Standar pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sosialisasi terhadap panti asuhan	7 (26%)	16 (59%)	4 (15%)	27
2	Pelatihan tentang standar panti asuhan	1 (4%)	8 (30%)	18 (66%)	27

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
3	Penerapan standar panti asuhan	14 (52%)	13 (48%)	0 (%)	27
4	Jumlah pegawai yang melakukan pengawasan	2 (8%)	16 (59%)	9 (33%)	27
5	Pelaksanaan proses pengawasan	6 (22%)	13 (48%)	8 (30%)	27
6	Jadwal pelaksanaan pengawasan	10 (36%)	14 (52%)	3 (12%)	27
Jumlah		40	80	42	162
Rata-rata		6	13	8	27
Persentase		22%	48%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 27 responden Pengelola panti asuhan di Kota Pekanbaru terhadap enam item yang dinilai yaitu sosialisasi terhadap panti asuhan pada kategori terlaksana ada 7 orang dengan persentase 26%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 16 orang dengan persentase 59%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 4 orang dengan persentase 15%. Dikarenakan sosialisasi terhadap panti asuhan sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif.

Untuk item penilaian kedua yaitu pelatihan tentang standar panti asuhan untuk kategori terlaksana ada 1 orang dengan persentase 4%, berpendapat bahwa ada pelatihan tentang standar panti asuhan yang diberikan. selanjutnya kategori cukup terlaksana ada 8 orang dengan persentase 30%, dikarenakan memang tidak

adanya dilakukan pelatihan terhadap pegawai apalagi kepada pihak panti asuhan , sedangkan kategori kurang terlaksana ada 18 orang dengan persentase 66%. Dikarenakan pelatihan tentang standar panti asuhan memang tidak ada dilaksanakan oleh pihak dinas.

Untuk item penilaian ketiga yaitu penerapan standar panti asuhan untuk kategori terlaksana ada 14 orang dengan persentase 52%, dikarenakan pihak panti asuhan sudah baik dalam menerapkan standar panti asuhan menurut peraturan yang berlaku. selanjutnya kategori cukup terlaksana ada 13 orang dengan persentase 48%, dikarenakan panti asuhan sudah cukup baik didalam penerapan standar yang sudah ditentukan, sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah 0.

Untuk item penilaian keempat yaitu jumlah pegawai yang melakukan pengawasan pada kategori terlaksana ada 2 orang dengan persentase 8%, dikarenakan jumlah pegawai sudah memadai untuk melakukan pengawasan, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 16 orang dengan persentase 59%, dikarenakan pada saat melakukan pengawasan jumlah pegawai sudah cukup memadai sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 9 orang dengan persentase 33%, dikarenakan jumlah pegawai pengawas panti asuhan masih sangat minim sehingga kurang efektif dalam proses pengawasan.

Untuk item penilaian kelima yaitu pelaksanaan proses pengawasan pada kategori terlaksana ada 6 orang dengan persentase 22%, dikarenakan proses pengawasan sudah berjalan dengan efektif, selanjutnya pada kategori cukup

terlaksana ada 13 orang dengan persentase 48%, dikarenakan sudah cukup efektif proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 8 orang dengan persentase 30%, dikarena proses pengawasan di panti asuhan kurang terlaksana dengan baik.

Untuk item penilaian keenam yaitu jadwal pelaksanaan pengawasan pada kategori terlaksana ada 10 orang dengan persentase 36%, dikarenakan jadwal sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan ada pemberitahuan sebelum melakukan pengawasan di panti asuhan, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 14 orang dengan persentase 52%, dikarenakan jadwal pengawasan sudah cukup baik, sedangkan pada kategori kurang terlaksana ada 3 orang dengan persentase 12%. Karena jadwal pengawasan kurang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Sosial bisa lebih maju ataupun mundur waktu pelaksanaannya.

Dari serangkaian uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden pada indikator menetapkan standar sudah cukup terlaksana dengan tingkat persentase 48%, sedangkan kategori terlaksana hanya 22% dan kategori kurang terlaksana 30%. Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru di panti asuhan Kota Pekanbaru dalam indikator Menetapkan Standar sudah cukup terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis terhadap beberapa item yang dinilai yaitu sosialisasi terhadap panti asuhan, pelatihan tentang standar panti asuhan, penerapan standar panti asuhan, jumlah pegawai yang melakukan pengawasan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat mengenai penetapan standar yaitu didalam melakukan pengawasan, pihak dinas sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur yang akan dilaksanakan, dari mulai pembuatan surat menyurat, pembentukan tim pengawas, jadwal untuk melakukan pengawasan dan pelaporan hasil dari pengawasan di panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Aspek standar panti asuhan yang di awasi meliputi sarana dan prasarana, pola pengasuhan anak, pelayanan terhadap anak oleh pengurus panti asuhan, selain itu juga ada penilaian Akreditasi panti asuhan oleh Kementerian Sosial secara langsung.

Dari observasi dan data kuesioner penulis melihat tanggapan pengurus panti asuhan tidak adanya pelatihan ataupun seminar tentang standar pengelolaan panti asuhan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Melakukan Penilaian di dalam proses pengawasan

Maksudnya adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pengawasan. Adapun yang menjadi item yang dinilai dari Melakukan Penilaian ini antara lain :

1. Menanggapi laporan dari masyarakat
2. Melaksanakan sidak
3. Penyimpangan yang ditemukan saat sidak
4. Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap Dinas Sosial

5. Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti
6. Partisipasi masyarakat terhadap panti asuhan
7. Optimalisasi pelaksanaan proses pengawasan

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berjumlah 12 orang terhadap indikator melakukan penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini :

Tabel V.9 : Tanggapan responden Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Melakukan Penilaian pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menanggapi laporan dari masyarakat	6 (50%)	6 (50%)	0 (%)	12
2	Melaksanakan sidak	4 (33%)	5 (42%)	3 (25%)	12
3	Penyimpangan yang ditemukan saat sidak	2 (17%)	3 (25%)	7 (58%)	12
4	Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap Dinas Sosial	7 (58%)	4 (33%)	1 (9%)	12
5	Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti	7 (58%)	5 (42%)	0 (%)	12
6	Partisipasi masyarakat terhadap panti	3 (25%)	3 (25%)	6 (50%)	12

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
	asuhan				
7	Optimalisasi pelaksanaan proses pengawasan	5 (42%)	7 (58%)	0 (%)	12
Jumlah		34	33	17	84
Rata-rata		5	4	3	12
Persentase		42%	33%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 12 responden pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru indikator memberikan penilaian untuk item penilaian yaitu menanggapi laporan dari masyarakat pada kategori terlaksana ada 6 orang dengan persentase 50%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 6 orang dengan persentase 50% dan pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Dikarenakan Dinas Sosial cukup baik dalam menanggapi laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyimpangan di panti asuhan.

Untuk item penilaian kedua yaitu melaksanakan sidak, pada kategori terlaksana ada 4 orang dengan persentase 33%, dikarenakan pihak Dinas Sosial mengadakan sidak setelah menerima laporan dari masyarakat selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan sudah cukup terlaksana dalam melakukan sidak dan pada kategori kurang terlaksana ada 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan Dinas Sosial tidak melakukan sidak saat menerima laporan dari masyarakat.

Untuk item penilaian ketiga yaitu penyimpangan yang ditemukan saat sidak, pada kategori terlaksana ada 2 orang dengan persentase 17%, dikarenakan cukup jarang ditemukan penyimpangan yang terjadi dipanti asuhan, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan cukup ada ditemukan penyimpangan saat melakukan pengawasan dan pada kategori kurang terlaksana ada 7 orang dengan persentase 58%, dikarenakan cukup banyak ditemukan penyimpangan di panti asuhan.

Untuk item penilaian keempat yaitu Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap Dinas Sosial, pada kategori terlaksana ada 7 orang dengan persentase 58%, dikarenakan keluhan panti asuhan ada tanggapan oleh dinas sosial, sedangkan pada kategori cukup terlaksana ada 4 orang dengan persentase 33% dikarenakan cukup baik tanggapan dinas sosial terhadap keluhan dari panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana ada 1 orang dengan persentase 9% dikarenakan kurang adanya tanggapan mengenai keluhan yang disampaikan oleh panti asuhan.

Untuk item penilaian kelima yaitu Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti, pada kategori terlaksana ada 7 orang dengan persentase 58%, dikarenakan selain menanggapi keluhan panti asuhan dinas sosial juga mencoba mencari solusi sedangkan pada kategori cukup terlaksana ada 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan sudah cukup baik tanggapan terhadap keluhan panti asuhan. pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Dikarenakan Dinas Sosial cukup baik menanggapi keluhan pihak panti asuhan.

Untuk item penilaian keenam yaitu Partisipasi masyarakat terhadap panti asuhan, pada kategori terlaksana ada 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan masih sangat minim respon masyarakat sekitar terhadap panti asuhan, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 25% dikarenakan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 50% dikarenakan masyarakat sekitar panti asuhan masih cukup kurang peduli terhadap panti asuhan yang ada disekitar mereka.

Untuk item penilaian ketujuh yaitu optimalisasi proses pengawasan , pada kategori terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42 %, dikarenakan proses pengawasan sudah optimal, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 58 % dan pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Dikarenakan proses pengawasan terlaksana cukup optimal yang dilaksanakan oleh tim pengawas panti asuhan dari dinas sosial.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan dalam indikator Melakukan Penilaian sudah terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap panti asuhan. Untuk kategori terlaksana 42 %, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana 33% dan pada kategori kurang terlaksana 25%. Dari observasi dan data kuesioner, penulis melihat pada beberapa item penilaian di atas pegawai kurang sigap dengan adanya laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran di panti asuhan. Kemudian banyak keluhan dari pihak panti asuhan mengenai dengan bangunan yang kurang

layak yang intinya berkaitan dengan pendanaan, disini pihak panti tidak bisa memberikan solusi, dikarekan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak ada anggaran bantuan dana untuk panti asuhan melainkan dari Dinas Sosial Provinsi Riau. Dan piha dinas juga kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar panti asuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap panti asuhan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban tanggapan dari responden pengurus panti asuhan berjumlah 27 orang terhadap indikator Prioritas Pelayanan yang terdiri dari sembilan item penilaian yaitu Menanggapi laporan dari masyarakat, Melaksanakan sidak, Penyimpangan yang ditemukan saat sidak, Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap Dinas Sosial, Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti, Partisipasi masyarakat terhadap panti asuhan, Optimalisasi pelaksanaan proses pengawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan responden Pengelola Panti Asuhan tentang Melakukan Penilaian pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menanggapi laporan dari masyarakat	7 (25%)	16 (59%)	4 (16%)	27
2	Melaksanakan sidak	3 (10%)	9 (34%)	15 (56%)	27
3	Penyimpangan yang ditemukan	4 (16%)	5 (19%)	18 (65%)	27

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
	saat sidang				
4	Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap dinas social	13 (49%)	11 (41%)	3 (10%)	27
5	Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti	11 (41%)	10 (37%)	6 (22%)	27
6	Partisipasi masyarakat terhadap panti asuhan	12 (44%)	9 (34%)	6 (22%)	27
7	Optimalisasi pelaksanaan proses pengawasan	8 (30%)	14 (52%)	5 (18%)	27
Jumlah		58	74	57	189
Rata-rata		9	11	7	27
Persentase		33%	41%	26%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 27 responden pengelola panti asuhan di Kota Pekanbaru dengan indikator memberikan penilaian untuk item penilaian yaitu menanggapi laporan dari masyarakat pada kategori terlaksana ada 7 orang dengan persentase 25%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 16 orang dengan persentase 59% dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 16%. Dikarenakan Dinas Sosial cukup baik dalam menanggapi laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyimpangan di panti asuhan.

Untuk item penilaian kedua yaitu melaksanakan sidak, pada kategori terlaksana ada 3 orang dengan persentase 10%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 9 orang dengan persentase 34% dan pada kategori kurang terlaksana ada 15 orang dengan persentase 66%. Dikarenakan pihak Dinas Sosial sangat jarang mengadakan sidak setelah menerima laporan dari masyarakat.

Untuk item penilaian ketiga yaitu penyimpangan yang ditemukan saat sidak, pada kategori terlaksana ada 4 orang dengan persentase 16%, dikarenakan sedikit ditemukan penyimpangan di panti asuhan, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada 5 orang dengan persentase 19% dikarenakan cukup ditemukan penyimpangan di panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana ada 18 orang dengan persentase 65%, dikarenakan cukup minim adanya penyimpangan yang terjadi di panti asuhan.

Untuk item penilaian keempat yaitu Penyampaian keluhan pengelola panti terhadap Dinas Sosial, pada kategori terlaksana ada 13 orang dengan persentase 49%, dikarenakan keluhan panti asuhan ada tanggapan oleh dinas sosial sedangkan pada kategori cukup terlaksana ada 11 orang dengan persentase 41% dikarenakan cukup baik tanggapan dinas sosial terhadap keluhan dari panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana ada 3 orang dengan persentase 10% dikarenakan kurang adanya tanggapan mengenai keluhan yang disampaikan oleh panti asuhan.

Untuk item penilaian kelima yaitu Tanggapan dinas terhadap keluhan pengelola panti, pada kategori terlaksana ada 11 orang dengan persentase 41%,

dikarenakan selain menanggapi keluhan panti asuhan dinas sosial juga mencoba mencari solusi sedangkan pada kategori cukup terlaksana ada 10 orang dengan persentase 37% dikarenakan sudah cukup baik tanggapan terhadap keluhan panti asuhan. dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 22%. Dikarenakan Dinas Sosial cukup baik menanggapi keluhan pihak panti asuhan.

Untuk item penilaian keenam yaitu Partisipasi masyarakat terhadap panti asuhan, pada kategori terlaksana ada 12 orang dengan persentase 44%, dikarenakan masih sangat minim respon masyarakat sekitar terhadap panti asuhan sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 34% dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 22% dikarenakan masyarakat sekitar panti asuhan masih cukup kurang peduli terhadap panti asuhan yang ada disekitar mereka.

Untuk item penilaian ketujuh yaitu optimalisasi proses pengawasan , pada kategori terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 30 %, dikarenakan proses pengawasan sudah optimal, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 14 orang dengan persentase 52 % dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 18%. Dikarenakan proses pengawasan terlaksana cukup optimal.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan dalam indikator Melakukan Penilaian sudah terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil

kuesioner dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan. Untuk kategori terlaksana 33 %, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana 41% dan pada kategori kurang terlaksana 26%.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat mengenai melakukan penilaian yaitu penilaian yang diberikan inilah hasil dari bentuk pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu tim pengawas langsung turun ke panti asuhan sesuai jadwal yang sudah ada dan secara tidak langsung itu pihak dinas menerima laporan dari masyarakat ataupun lembaga sosial lainnya. Setelah itu tim pengawas memberikan penilaian terhadap panti asuhan, apakah panti asuhan sudah baik, cukup baik ataupun kurang baik. Sesuai dengan kondisi di panti asuhan di Kota Pekanbaru tersebut. Penilaian ini juga dijadikan pedoman atau panduan didalam penilaian Akreditasi panti asuhan oleh Kementerian Sosial.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan dalam indikator Melakukan Penilaian sudah cukup terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap panti asuhan.

3. Mengoreksi Pengambilan Tindakan

Maksudnya adalah suatu langkah untuk menentukan solusi dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di panti asuhan. Adapun yang

menjadi item yang dinilai dari Mengoreksi Pengambilan Tindakan ini antara lain :

1. Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi
2. Pemberian sanksi tertulis
3. Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis
4. Sanksi pencabutan izin
5. Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan
6. Penerapan hasil evaluasi
7. Hasil perbaikan dari tahun ke tahun
8. Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai seksi pemberdayaan siosial kelembagaan masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berjumlah 12 orang terhadap Mengoreksi Pengambilan Tindakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.11 berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan responden Pegawai Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Mengoreksi Pengambilan Tindakan pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi	8 (67%)	4 (33%)	0 (0%)	12
2	Pemberian sanksi tertulis	5 (42%)	6 (50%)	1 (8%)	12

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
3	Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis	1 (8%)	5 (42%)	6 (50%)	12
4	Sanksi pencabutan izin	7 (58%)	5 (42%)	0 (0%)	12
5	Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan	9 (75%)	3 (25%)	0 (0%)	12
6	Penerapan hasil evaluasi	5 (42%)	6 (50%)	1 (8%)	12
7	Hasil perbaikan dari tahun ke tahun	3 (25%)	8 (67%)	1 (8%)	12
8	Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal	5 (42%)	4 (33%)	3 (25%)	12
Jumlah		43	41	12	96
Rata-rata		6	4	2	12
Persentase		50%	33%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2019

Dari tabel V. 11 di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 12 responden pegawai dinas pada indikator mengoreksi pengambilan tindakan untuk item penilaian yaitu Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, pada kategori terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 67%, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 33% dan pada kategori kurang terlaksana adalah 0.

Untuk item penilaian kedua yaitu Pemberian sanksi tertulis, pada kategori terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan sudah dilakukannya pemberian sanksi tertulis oleh pihak dinas sosial sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 50% dikarenakan sudah cukup ada pemberian sanksi tertulis kepada pihak panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 8%. Dikarenakan kurang adanya sanksi tertulis kepada panti asuhan yang melakukan penyimpangan.

Untuk item penilaian ketiga yaitu Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis, pada kategori terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 8%, masih sangat sedikit panti asuhan yang melakukan perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang ada sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42 %, dikarenakan sudah cukup dilakukan perbaikan di panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 50% dikarenakan masih minim kesadaran panti asuhan untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Untuk item penilaian keempat yaitu Sanksi pencabutan izin, pada kategori terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 58%, dikarenakan adanya pencabutan izin operasi panti asuhan dengan ditemukannya penyimpangan yang berat, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42% dikarenakan sudah cukup tegas pihak dinas sosial memberikan sanksi pencabutan izin panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana adalah 0.

Untuk item penilaian kelima yaitu Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan, pada kategori terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 75%, dikarenakan sudah adanya evaluasi yang dilakukan oleh dinas dengan panti asuhan, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 25% dikarenakan sudah cukup baik evaluasi yang dilakukan dan pada kategori kurang terlaksana adalah 0. Dikarenakan setelah adanya hasil pengawasan di panti asuhan maka akan dilakukan proses evaluasi untuk perbaikan ke depannya.

Untuk item penilaian keenam yaitu Penerapan hasil evaluasi, pada kategori terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan sudah baik penerapan yang dilakukan panti asuhan dengan hasil evaluasi yang ada, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 50%, dikarenakan sudah cukup baik penerapan dari hasil evaluasi dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 8%, dikarenakan masih kurang melakukan perbaikan atas apa hasil dari evaluasi yang ada.

Untuk item penilaian ketujuh yaitu Hasil perbaikan dari tahun ke tahun, pada kategori terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan hasil peningkatan perbaikan dari tahun ke tahun sudah baik atau terlaksana sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 67%, dikarenakan sudah cukup terlaksana perbaikan yang dilakukan untuk jangka hitungan tahun dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 8%, dikarenakan masih kurang adanya perubahan perbaikan yang cepat dari pihak panti asuhan.

Untuk item penilaian terakhir yaitu Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal, pada kategori terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 42%, dikarenakan pihak dinas sudah memberikan sanksi terhadap pegawai yang tidak maksimal ketika melakukan pengawasan yaitu dengan tidak memasukkannya lagi ke dalam tim pengawas panti asuhan, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 33%, dikarenakan sudah cukup tegas pemberian sanksi terhadap pegawai yang kinerjanya kurang optimal dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan kurang tegasnya sanksi diberikan kepada pegawai yang tidak optimal dalam kinerjanya tersebut.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan dalam indikator Mengoreksi pengambilan tindakan sudah terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap panti asuhan. Untuk kategori terlaksana 50%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana 33% dan pada kategori kurang terlaksana 17%. Dari observasi dan data kuesioner, penulis melihat adanya sanksi secara lisan maupun tertulis oleh pihak dinas ketika mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi di panti asuhan. Tetapi pada saat dilakukan pengawasan, yang banyak di temukan hanya permasalahan bangunan yang sudah over kapasitas, untuk penyimpangan berat sangat susah untuk ditemukan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pengurus panti asuhan di Kota Pekanbaru yang berjumlah 27 orang terhadap

indikator mengoreksi pengambilan tindakan yang terdiri dari delapan item penilaian yaitu Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, Pemberian sanksi tertulis, Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis, Sanksi pencabutan izin, Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan, Penerapan hasil evaluasi, Hasil perbaikan dari tahun ke tahun, Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.12 berikut ini :

Tabel V.12 :Tanggapan responden Pengelola Panti Asuhan tentang Mengoreksi Pengambilan Tindakan pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi	10 (37%)	15 (56%)	2 (7%)	27
2	Pemberian sanksi tertulis	11 (41%)	13 (48%)	3 (11%)	27
3	Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis	15 (56%)	11 (41%)	1 (3%)	27
4	Sanksi pencabutan izin	13 (48%)	11 (41%)	3 (11%)	27
5	Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan	5 (19%)	16 (59%)	6 (22%)	27
6	Penerapan hasil evaluasi	7 (25%)	15 (56%)	5 (19%)	27
7	Hasil perbaikan dari tahun ke	5 (19%)	12 (44%)	10 (37%)	27

No	Item penilaian	Kategori jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
	tahun				
8	Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal	9 (34%)	11 (41%)	7 (25%)	27
Jumlah		75	104	37	216
Rata-rata		9	13	5	27
Persentase		33%	48%	19%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari tabel V. 12 di atas dapat diketahui bahwa pendapat dari 27 responden pengelola panti asuhan pada indikator mengoreksi pengambilan tindakan untuk item penilaian yaitu Penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, pada kategori terlaksana sebanyak 10 orang dengan persentase 37%, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 56% dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 7%.

Untuk item penilaian kedua yaitu Pemberian sanksi tertulis, pada kategori terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 41%, dikarenakan sudah dilakukannya pemberian sanksi tertulis oleh pihak dinas sosial, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 13 orang dengan persentase 48%, dikarenakan sudah cukup ada pemberian sanksi tertulis kepada pihak panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 11%. Dikarenakan pihak Dinas Sosial tidak segan-segan untuk memberikan sanksi terhadap panti asuhan yang melakukan penyimpangan.

Untuk item penilaian ketiga yaitu Perbaikan setelah mendapatkan sanksi tertulis, pada kategori terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 56%, masih sangat sedikit panti asuhan yang melakukan perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang ada, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 41%, dikarenakan sudah cukup dilakukan perbaikan di panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 3%, dikarenakan masih minim kesadaran panti asuhan untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Untuk item penilaian keempat yaitu Sanksi pencabutan izin, pada kategori terlaksana sebanyak 13 orang dengan persentase 48%, dikarenakan adanya pencabutan izin operasi panti asuhan dengan ditemukannya penyimpangan yang berat, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 41%, dikarenakan sudah cukup tegas pihak dinas sosial memberikan sanksi pencabutan izin panti asuhan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 11%, dikarenakan masih belum tegas sanksi yang diberikan oleh pihak dinas sosial.

Untuk item penilaian kelima yaitu Evaluasi antara dinas dengan panti asuhan, pada kategori terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 19%, dikarenakan sudah adanya evaluasi yang dilakukan oleh dinas dengan panti asuhan, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 16 orang dengan persentase 59%, dikarenakan sudah cukup baik evaluasi yang dilakukan dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 22%.

Dikarenakan setelah adanya hasil pengawasan di panti asuhan maka akan dilakukan proses evaluasi untuk perbaikan ke depannya.

Untuk item penilaian keenam yaitu Penerapan hasil evaluasi, pada kategori terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 25%, dikarenakan sudah baik penerapan yang dilakukan panti asuhan dengan hasil evaluasi yang ada, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 56%, dikarenakan sudah cukup baik penerapan dari hasil evaluasi dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 19% dikarenakan masih kurang melakkan perbaikan atas apa hasil dari evaluasi yang ada.

Untuk item penilaian ketujuh yaitu Hasil perbaikan dari tahun ke tahun, pada kategori terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 25%, dikarenakan hasil peningkatan perbaikan dari tahun ke tahun sudah baik atau terlaksana, sedangkan pada kategori cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 67%, dikarenakan sudah cukup terlaksana perbaikan yang dilakukan untuk jangka hitungan tahun dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 8%, dikarenakan masih kurang adanya perubahan perbaikan yang cepat dari pihak panti asuhan.

Untuk item penilaian terakhir yaitu Sanksi terhadap pegawai dinas yang tidak optimal, pada kategori terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 34%, dikarenakan pihak dinas sudah memberikan sanksi terhadap pegawai yang tidak maksimal ketika melakukan pengawasan yaitu dengan tidak memasukkannya lagi ke dalam tim pengawas panti asuhan, sedangkan pada

kategori cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase 41%, dikarenakan sudah cukup tegas pemberian sanksi terhadap pegawai yang kinerjanya kurang optimal dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 25%, dikarenakan kurang tegasnya sanksi diberikan kepada pegawai yang tidak optimal dalam kinerjanya tersebut.

Dari data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap panti asuhan dalam indikator Mengoreksi pengambilan tindakan sudah terlaksana, ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial kota Pekanbaru terhadap panti asuhan. Untuk kategori terlaksana 33%, selanjutnya pada kategori cukup terlaksana 48% dan pada kategori kurang terlaksana 19%.

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat mengenai mengoreksi pengambilan tindakan yaitu menindaklanjuti dari melakukan penilaian terhadap panti maka tim pengawas akan mengambil tindakan misalnya untuk panti asuhan yang sudah baik maka akan ada rekomendasi Akreditasi ke pihak Kementerian Sosial, dan untuk panti asuhan yang ditemukan penyimpangan oleh tim pengawas, maka Dinas Sosial akan mengambil tindakan seperti memberikan teguran secara lisan ataupun tulisan, bahkan akan melakukan pencabutan izin operasi panti asuhan apabila jelas melakukan pelanggaran berat.

Dari observasi dan data kuesioner, penulis melihat kendala yang dihadapi panti asuhan yaitu mengenai perkembangan panti asuhan untuk jangka panjang, panti asuhan cukup kesulitan untuk mencari donatur untuk membantu keuangan panti asuhan, sehingga banyak ditemukan bangunan-bangunan yang sudah tidak layak pakai ataupun sudah over kapasitas. Tidak bisa dipungkiri juga apabila ditemukan anak panti asuhan yang sakit bahkan sampai meninggal dunia yang dikarekan kondisi panti asuhan yang tidak maksimal.

Tabel V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Indikator yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menetapkan Standar	4 (33%)	5 (42%)	3 (25%)	12
2	Melakukan Penilaian	5 (42%)	4 (33%)	3 (25%)	12
3	Mengoreksi Pengambilan Tindakan	6 (50%)	4 (33%)	2 (17%)	12
Jumlah		15	13	8	36
Rata-rata		5	4	3	12
Persentase		42%	33%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden pegawai dinas terhadap variabel Pengawasan, untuk kategori penilaian terlaksana yaitu sebesar 42%, untuk kategori cukup terlaksana yaitu sebesar 33% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu sebesar 25% dari total keseluruhan responden pegawai dinas sebanyak 12 orang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 42%, sesuai

dengan penjelasan di depan tentang persentase sebesar 34%-66% masuk ke dalam kategori cukup terlaksana, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pengelola Panti Asuhan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

No	Indikator yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menetapkan Standar	6 (22%)	13 (48%)	8 (30%)	27
2	Melakukan Penilaian	9 (33%)	11 (41%)	7 (26%)	27
3	Mengoreksi Pengambilan Tindakan	9 (33%)	13 (48%)	5 (19%)	27
Jumlah		24	37	20	81
Rata-rata		8	12	7	27
Persentase		30%	44%	26%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden pengelola panti asuhan terhadap variabel Pengawasan, untuk kategori penilaian terlaksana yaitu sebesar 30%, untuk kategori cukup terlaksana yaitu sebesar 44% dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu sebesar 26% dari total keseluruhan responden pengelola panti asuhan sebanyak 27 orang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 44%, sesuai dengan penjelasan di depan tentang persentase sebesar 34%-66% masuk ke dalam kategori cukup terlaksana, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mengenai indikator Menetapkan

Standar dijelaskan bahwa standar yang ditetapkan sudah cukup jelas seperti standar tempat tinggal, bahan-bahan makanan yang dikonsumsi sampai dengan aspek kesehatan para penghuni panti baik itu pemberian imunisasi dan vaksin serta pemberian obat-obatan lainnya. Tetapi selama kami melakukan pengawasan hal yang kami temukan kebanyakan ruangan atau gedung yang over kapasitas. Mengenai hal pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dengan kemampuan pendanaan dari setiap panti asuhan. Bagaimana bisa mendapatkan dan mengatur masalah keuangan dengan para donatur, dikarenakan pihak kami tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan berupa dana. dan kami sudah mempunyai jadwal untuk melakukan pengawasan yaitu sekali dalam setahun secara bergantian setiap pantinya. Untuk Menetapkan standar pengawasan ini sudah diatur oleh kementerian sosial.

Selanjutnya untuk indikator Melakukan penilaian, dijelaskan bahwa pada indikator ini dengan sudah adanya standar ketentuan setiap panti asuhan terkadang masih adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam panti asuhan, contohnya seperti banyak bahan makanan yang sudah lewat batas waktu konsumsi, anak panti yang sakit tetapi tidak dibawa berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit. Dengan adanya temuan seperti ini maka pihak Dinas Sosial memberikan peringatan atau teguran kepada pengelola panti asuhan.

Kemudian pada indikator terakhir yaitu Mengoreksi Pengambilan Tindakan, dengan adanya temuan indikasi penyimpangan didalam panti asuhan maka tidak segan-segan kami akan memberikan teguran ataupun sanksi secara tertulis ataupun sampai pembekuan izin operasi panti asuhan. Itu semua dilakukan

supaya panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru memiliki standar yang baik. Dan untuk itu setiap tahun juga dilakukan evaluasi agar penyimpangan yang terjadi bisa diminimalisir bahkan bisa dihilangkan.

Hasil observasi peneliti pada indikator menetapkan standar yaitu dari beberapa item yang dinilai di atas pegawai dinas telah melaksanakan item-item penilaian pada indikator Menetapkan Standar dengan cukup terlaksana, misalnya pegawai telah memaparkan indikator-indikator yang akan diawasi di panti asuhan, kemudian jadwal pengawasan yang rutin dan jumlah pengawas yang memadai. Tetapi pada item ke dua yaitu tentang adanya pelatihan khusus untuk pemilik panti mengenai standar panti asuhan yang baik itu tidak ada diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Selanjutnya pada indikator memberikan penilaian yaitu penulis melihat pada beberapa item penilaian di atas pegawai kurang sigap dengan adanya laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran di panti asuhan. Kemudian banyak keluhan dari pihak panti asuhan mengenai dengan bangunan yang kurang layak yang intinya berkaitan dengan pendanaan, disini pihak panti tidak bisa memberikan solusi, dikarekan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak ada anggaran bantuan dana untuk panti asuhan melainkan dari Dinas Sosial provinsi riau. Dan piha dinas juga kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar panti asuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap panti asuhan.

Untuk indikator mengoreksi pengambilan tindakan yaitu penulis melihat kendala yang dihadapi panti asuhan yaitu mengenai perkembangan panti asuhan untuk jangka panjang, panti asuhan cukup kesulitan untuk mencari donatur untuk membantu keuangan panti asuhan, sehingga banyak ditemukan bangunan-bangunan yang sudah tidak layak pakai ataupun sudah over kapasitas. Tidak bisa dipungkiri juga apabila ditemukan anak panti asuhan yang sakit bahkan sampai meninggal dunia yang dikarekan kondisi panti asuhan yang tidak maksimal. Dan selain itu pihak dinas juga tidak segan-segan untuk memberikan sanksi baik secara tertulis bahkan sampai pencabutan izin operasi panti asuhan.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru

Faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru antara lain :

- a. Hambatan dalam penetapan standar pengawasan yaitu SOP yang ada hanya berisi proses atau alur surat menyurat, tetapi rincian teknis atau proses dilapangan saat melakukan pengawasan tersebut tidak ada.
- b. Hambatan dalam melakukan penilaian yaitu kurangnya jumlah personil tim pengawas dan padatnya jadwal pengawasan dikarenakan jadwal pengawasan didalam satu hari melakukan pengawasan di 4 atau 5 panti asuhan. Sehingga waktu untuk melakukan juga bisa dikatakan kurang maksimal. Karna cukup banyak standar penilaian yang akan dinilai misalnya kondisi sarana

prasarana panti asuhan, jumlah dan kondisi anak panti asuhan, proses pelayanan pengelola panti asuhan terhadap anak, berkas-berkas panti asuhan sampai dengan pengelolaan keuangan panti asuhan. Dan jadwal pengawasan tersebut hanya dilakukan sekali dalam setahun.

- c. Hambatan dalam mengoreksi pengambilan tindakan yaitu dengan hanya sekali dalam setahun melakukan pengawasan, maka kurang efektif untuk bisa melihat atau menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di panti asuhan. Dan dengan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar panti asuhan. Sehingga penyimpangan yang terjadi sangat sulit untuk diketahui. dan walaupun sudah adanya sanksi tegas yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial terhadap panti asuhan, tetap saja masih terjadi penyimpangan di panti asuhan, misalnya seperti kasus balita meninggal dunia dikarenakan terlambat menerima penanganan medis.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial Pada Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- 1 Menetapkan Standar kategori penilaian responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat berada pada kategori Terlaksana, dan untuk kategori penilaian responden pengelola panti asuhan berada pada kategori cukup terlaksana. Tetapi jika dari kedua responden digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari menetapkan standar dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup terlaksana. Maka oleh karena itu dalam menetapkan standar ini harus menyesuaikan jumlah anggota tim pengawas, tim pengawas yang sangat minim dengan jumlah panti asuhan 27 tempat sehingga hanya bisa melakukan pengawasan 1 kali dalam setahun.
- 2 Melakukan Penilaian kategori penilaian responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat berada pada kategori terlaksana, dan untuk kategori penilaian responden pengelola panti asuhan pada kategori cukup terlaksana. Tetapi jika dari kedua responden

digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari Melakukan Penilaian dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup terlaksana. Maka oleh karena itu dalam melakukan penilaian ini tim pengawas harus lebih giat untuk melaksanakan sidak atas adanya laporan dari masyarakat sehingga bisa cepat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi di panti asuhan dan tim pengawas harus objektif didalam melakukan pengawasan di setiap panti asuhan.

- 3 Mengoreksi Pengambilan Tindakan kategori penilaian responden pegawai seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat pada kategori terlaksana sedangkan pada responden pengelola panti asuhan berada pada kategori cukup terlaksana. Jika digabungkan pada tabel rekapitulasi maka pada kategori cukup terlaksana 34-66%.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan pada penetapan standar ini dikarekan tim pengawas cukup sedikit di banding jumlah panti asuhan, sehingga berakibat kurang efektifnya pengawasan yaitu di dalam setahun hanya sekali melakukan pengawasan.
2. Sangat perlu diadakannya sidak ketika adanya laporan dugaan penyimpangan di panti asuhan, sehingga bisa mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya di panti asuhan tersebut.

3. Sangat perlu ketegasan dari pihak Dinas Sosial terhadap panti asuhan yang melakukan penyimpangan baik secara tertulis maupun sampai pencabutan izin operasi panti asuhan. Dan terhadap tim pengawas di lapangan apabila kinerjanya tidak maksimal. Misalnya ketika melakukan pengawasan terlihat tidak ada penyimpangan ternyata pada suatu waktu terkuak penyimpangan yang terjadi, misalnya seperti seorang balita yang sedang sakit dikarenakan tidak cepat tanggap pengelola panti asuhan mengakibatkan balita tersebut meninggal dunia.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia : Bandung.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana : Jakarta.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu .1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia* .Bandung.:Bumi Aksara.
- Hendry, A dan Tarmizi Yussa *Perilaku & Etika Administrasi Publik*, Pekanbaru.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Yusuf. 1997. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Kencana, Inu Syafei. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Askara.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Refika Aditama.
- Siagian, Sondang. P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P . *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Terry,George.R 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Tjiptono, Fandy dan Chandra. 2008. *Pemasaran Strategic*. Yogyakarta : Andi Ofset.

Tjiptono, Fandy. 2002. *Prinsip-prinsip Quality Service*. Yogyakarta : Andi Ofset.

Wirman, Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Zulkifli, fungsi – fungsi Manajemen, Pekanbaru

Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, UIR

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan WaliKota Pekanbaru No. 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

